

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PELAKSANAAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DAN
PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini Disusun untuk Memenuhi
Gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang Komunikasi dengan
spesifikasi Hubungan Masyarakat



Disusun Oleh :

KRISYUNITARI

2016/PR/5174

PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**“PELAKSANAAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DAN PEMBERDAYAAN
PERAN SERTA MASYARAKAT”**

Laporan Praktik Kerja Lapangan Ini Disusun Untuk Memenuhi Gelar Ahli Madya
(A.Md) Dalam Bidang Komunikasi Dengan Spesifikasi Hubungan Masyarakat

Disusun Oleh :

KRISYUNITARI

2016/PR/5174

STIKOM
Disetujui oleh :
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
Y O G Y A K A R T A
FIRDHA IRMAWATI, M.A.

Dosen Pembimbing

PROGRAM STUDI D3 HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI (STIKOM)

YOGYAKARTA

2019

PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini telah diterima dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir dan telah dipresentasikan dihadapan dosen penguji Hubungan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Agustus 2019
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Presentasi

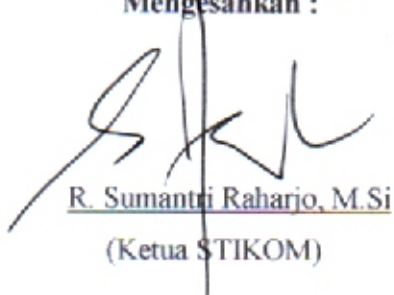
1. Firdha Irmawati, M.A.
(Pembimbing dan Penguji I)

2. Rofiq Anwar, M.A.
(Penguji II)

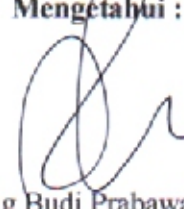
3. Hening B Prabawati, M.Si.
(Penguji III)

STIKOM
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
YOGYAKARTA

Mengesahkan :


R. Sumantri Raharjo, M.Si
(Ketua STIKOM)

Mengetahui :


Hening Budi Prabawati, M.Si
(Ketua Program Studi Hubungan Masyarakat)

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Nama : KRISYUNITARI
NIM : 2016/PR/5174
Judul Laporan : Pelaksanaan *Community Development* Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Program Pemberdayaan Alternatif dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis yang saya buat berupa laporan ini bersifat orisinal, murni karya saya, merupakan deskripsi atas latihan kerja Profesional selama saya menempuh praktik kerja lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bimbingan dosen pembimbing.
2. Karya ini bukan plagiasi (*copy-paste*) karya serupa milik orang lain, kecuali yang saya kutip seperlunya untuk mendukung argumentasi yang saya buat, dan kemudian saya cantumkan sumbernya secara resmi dalam daftar pustaka laporan sebagai rujukan ilmiah; disambung dalam catatan kaki pada halaman tulisan
3. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan tindak plagiasi (*plagiarism*), dan pelanggaran Etika Akademik, yang secara sah dapat dibuktikan berdasarkan dokumen-dokumen yang terpercaya keasliannya oleh pimpinan STIKOM, maka saya bersedia dicabut gelar atau hak saya sebagai Ahli Madya Komunikasi, yang kemudian di publikasikan secara luas oleh STIKOM.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Yogyakarta, 21 Agustus 2019



KRISYUNITARI

MOTTO

TUHAN itu dekat kepada *orang-orang* yang patah *hati*, dan Ia menyelamatkan *orang-orang yang remuk* jiwanya.

Mazmur 34 : 19

We will never know the real answer, before you try.

Unknown

HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya, Pak Tar dan Bu Kar yang selalu sabar menunggu saya pulang dan menasehati saya supaya segera menyelesaikan Tugas Akhir saya.
3. Adik saya, Kristian Agustinus Nugroho yang sedikit membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.
4. Partner ngelembur saya, Yanuar Tresno Pambudi yang selalu menasehati dan marah jika saya mulai malas mengerjakan laporan Tugas Akhir ini.
5. Mbak Lulu, yang senantiasa membantu penulisan laporan Tugas Akhir saya.
6. Pramita, yang sering menjadi tempat berkeluh kesah dan bank data pribadi saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan yang berjudul: *Proses Community Development* Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa. Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis sejak tanggal 1 Februari 2019 hingga 5 April 2019 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya hormati, Bapak Sutaryadi dan Ibu Sukarni yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan dalam kondisi apapun.
2. Bapak R. Sumantri Raharjo, S. Sos, M. Si. selaku Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta.
3. Ibu Firdha Irmawati, M. A. selaku pembimbing dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Hening Budi Prabawati, M. Si. selaku Kepala Program Studi *Public Relations* yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan laporan ini.
5. Seluruh jajaran Dosen dan *Staff* Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, khususnya *Public Relations*.
6. Adikku, Kristian Agustinus Nugroho yang sedikit banyak memberikan semangat dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.
7. Yanuar Tresno Pambudi yang dengan senantiasa menemani lembur dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.
8. Pramita Desi yang membantu dalam pengumpulan data guna memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.

9. Teman-teman Program Studi *Public Relations* angkatan 2016 yang sedikit banyak memotivasi dalam proses penyelesaian penulisan laporan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh jajaran *staff* Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih ada beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap dan akan terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap, Laporan Tugas Akhir ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Agustus 2019

KRISYUNITARI

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Etika Akademik.....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Abstak	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	4
C...Maksud dan Tujuan.....	4
D...Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pratik Kerja Lapangan.....	5
E... Metode Pengumpulan Data.....	5

BAB II KERANGKA KONSEP

A...Penegasan Judul.....	8
B...Landasan Teori.....	11
1.... <i>Public Relations</i>	11
a....Definisi <i>Public Relations</i>	11
b....Tujuan <i>Public Relations</i>	13
c....Fungsi <i>Public Relations</i>	14
d....Peran <i>Public Relations</i>	16
2....Humas Dalam Pemerintah.....	17
a....Definisi Humas Dalam Pemerintah.....	17
b....Peran Humas Dalam Pemerintah.....	18

c....Tujuan Humas Dalam Pemerintah.....	18
3.... <i>Community Developmet</i>	19
a....Definisi <i>Community Development</i>	19
b....Karakteristik <i>Community Development</i>	21
c....Prinsip <i>Community Development</i>	22
d....Tahap Pelaksanaan <i>Community Development</i>	24

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1....Profil BNNP DIY	28
2....Sejarah BNNP DIY	29
3....Visi BNNP DIY	33
4....Misi BNNP DIY	33
5....Kedudukan BNNP DIY	33
6....Tugas BNNP DIY	33
7....Fungsi BNNP DIY	34
8....Struktur Organisasi BNNP DIY	35
9....Gambaran Umum Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	37
10..Logo BNNP DIY	39

BAB IV KEGIATAN PKL DAN PEMBAHASAN

A...Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	41
B...Pembahasan	50
a).. Pemberdayaan Alternatif	56
b).. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.....	77
C...Analisi penulis.....	90

BAB V PENUTUP

A...Kesimpulan.....	93
B...Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1 Konsep <i>Community Development</i>	10
3.1 Denah lokasi berdasarkan Google Maps.....	31
3.2 Struktur organisasi BNNP DIY.....	35
3.3 Logo BNNP DIY.....	39
4.1 Kegiatan pemberdayaan alternatif BNNP DIY dari tahun 2016-2019.....	58
4.2 Dokumentasi kegiatan sosialisasi	65
4.3 Hari pertama kegiatan pelatihan “ <i>lifeskill</i> ” Kopi dan Barista.....	67
4.4 Dokumentasi perwakilan BNNP DIY, BNNK Bantul, dan Kecamatan Banguntapan saat memberikan sambutan.....	67
4.5 Penyampaian materi “Kopi dan Barista”	68
4.6 Pemaparan <i>trainer</i> JTTC.....	68
4.7 Praktik Menggunakan Mesin Kopi.....	69
4.8 Praktik <i>manual brew</i> yang dilakukan peserta.....	69
4.9 Penyerahan alat <i>manual brew</i> Dari BNNP DIY kepada peserta pelatihan.	70
4.10 <i>Socialize</i> program pemberdayaan alternatif pada media online KR Jogja.	72
4.11 <i>Socialize</i> program pemberdayaan alternatif pada website Kecamatan Banguntapan.....	74
4.12 <i>Socialize</i> program pemberdayaan alternatif pada media sosial milik BNNP DIY (@infobnn_prov_diyogyakarta).....	75
4.13 Bangun prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif.....	76
4.14 Rapat koordinasi program pemberdayaan peran serta masyarakat.....	80
4.15 Dokumentasi kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat di lingkungan pemerintah.....	82

4.16 Simbolis penyematan pin penggiat anti narkoba.....	82
4.17 Dokumentasi kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba dilingkungan masyarakat.....	83
4.18 Penyematan pin penggiat anti narkoba	83
4.17 <i>Socialize</i> program melalui <i>website</i> milik Kominfo Kulon Progo.....	87
4.18 Bagan prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam pelaksanaan program pemberdayaan peran serta masyarakat.....	89.

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar nama tim kehumasan BNNP DIY	36
4.1 <i>List</i> giat Dayamas tahun 2019.....	51
4.2 Daftar wilayah rawan berdasarkan lokasi penangkapan tahun 2019 menurut pemaparan perwakilan Polda DIY	59
4.3 Pemetaan kawasan rawan berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh BNNP DIY	60
4.4 Daftar nama peserta kegiatan pemberdayaan alternatif tahun 2019.....	66
4.5 Daftar nama peserta kegiatan pemberdayaan alternatif tahun 2019.....	71
4.6 Daftar nama peserta pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba di lingkungan masyarakat.....	85
4.7 Daftar nama peserta pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba di lingkungan pemerintah.....	86

ABSTRAK

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini mengambil judul “Proses *Community Development* BNNP DIY melalui Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif.” Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses *community development* yang dilaksanakan oleh subbidang pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah konsep *corporate social responsibility* melalui pendekatan *community development*, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.

Community development merupakan suatu pendekatan konsep *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh seorang praktisi hubungan masyarakat dalam upaya menjaga hubungan baik dengan publiknya. Dalam pelaksanaan *community development* terdapat enam prinsip utama, yaitu : *Development, Involve, Socialize, Cater, Utilize, dan Socialize*. BNNP DIY memiliki dua program yang berkaitan dengan konsep *community development*, yaitu : Program pemberdayaan peran serta masyarakat dan program pemberdayaan alternatif. Di dalam perlaksanaanya terdapat jenis publik yang terlibat, yaitu masyarakat kawasan rawan dan masyarakat yang ada diwilayah kerja BNNP DIY. Tujuan dari program pemberdayaan peran serta masyarakat adalah untuk membentuk penggiat anti narkoba dari lingkungan masyarakat yang nantinya diharapkan dapat melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Sedangkan pemberdayaan alternatif bertujuan untuk memberikan ilmu kepada mantan pengguna narkoba dan orang rawan. Diharapkan melalui program pemberdayaan alternatif, pesertanya dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : *Community development, Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat, Pemberdayaan Alternatif.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Komunitas merupakan kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Suatu komunitas biasanya berdiri karena para anggota komunitas ingin mencapai suatu tujuan bersama. Selain untuk mencapai tujuan, komunitas juga dianggap sebagai wadah yang pas untuk berkembang bagi anggota komunitas tersebut. Biasanya komunitas yang terbentuk berdasarkan minat yang sama maupun lokasi yang sama. Dalam upaya komunitas untuk berkembang membutuhkan pihak lain, baik secara finansial maupun teknis.

Community Development merupakan program yang dilakukan oleh suatu instansi dalam upaya membantu suatu komunitas atau organisasi mendapatkan kehidupan yang lebih layak baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Induk dari kegiatan *Community Development* ini adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep ini menekankan bahwa setiap perusahaan atau instansi memiliki tanggung jawab dalam membantu masyarakat sekitar untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, dan budaya melalui serangkaian program yang telah direncanakan dan terorganisir dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Dalam konsep *Public Relations* lama, peran *public relations* hanya sebatas pemberi donasi sehingga seorang praktisi *Public Relations* hanya membantu masyarakat atau komunitas dari segi finansial saja. Sasaran program *Corporate Social Responsibility* adalah masyarakat yang berada disekitar instansi ataupun lembaga. Namun dalam konsep *Public Relations* yang baru terdapat pengembangan konsep dimana posisi *Public Relations* dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* tidak hanya sebagai pemberi donasi kepada masyarakat atau komunitas melainkan menempatkan masyarakat atau komunitas sebagai mitra. Selain dipandang sebagai mitra, sasaran masyarakat yang menjadi target dalam program *Corporate Social Responsibility* ini juga diperluas sehingga tidak hanya masyarakat sekitar perusahaan saja melainkan masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaan program *Community*

Development, salah satu pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Fahrudin (2012:96-97) upaya yang harus dilakukan guna terlaksananya pemberdayaan masyarakat ada tiga, yaitu *Enabling*, *Empowering*, dan *Protecting*. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Tujuannya adalah mengenali potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan. Upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki. Sedangkan *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Tahap ini meliputi langkah-langkah nyata seperti membukakan akses kepada berbagai peluang yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terakhir yaitu *Protecting*, melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Melindungi dalam hal ini dalam upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Dalam pemberdayaan masyarakat ada empat prinsip utama yang menjadi fokus mengapa program pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dan dinyatakan sukses, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najati dkk, 2005:54). Prinsip utama yang harus dipegang adalah kesetaraan atau kesejajaran antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian dari masyarakat adalah program pemberdayaan yang sifatnya partisipatif, direncanakan, diawasi, dan dievaluasi sehingga dapat diketahui sampai sebatas mana tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat terhadap program pemberdayaan yang diselenggarakan. Prinsip keswadayaan

adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang dengan ekonomi rendah sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Dan yang terakhir Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Tujuan dari kegiatan *community development* ini adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu instansi yang menjalankan kegiatan *communiy developmet* ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) merupakan lembaga vertikal dibawah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang bertanggung jawab menjalankan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan wilayah kerja di lingkungan provinsi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) memiliki keprihatinan terhadap banyaknya lokasi rawan penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini selaras dengan fungsi BNNP DIY, yaitu Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dengan subbidang Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas), BNNP DIY melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan masyarakat melalui dua program, yaitu program

pemberdayaan peran serta masyarakat dan program pemberdayaan alternatif. Program pemberdayaan peran serta masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk membentuk relawan penggiat anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan instansi swasta atau dunia usaha, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan pemberdayaan alternatif merupakan program pelatihan terhadap warga masyarakat di kawasan rawan narkoba, bekerjasama dengan *stakeholder* lain tujuan program ini adalah memberikan ilmu kepada masyarakat di kawasan rawan agar terhindar dari jerat narkoba dengan pemberian pelatihan yang diharapkan dapat digunakan untuk membangun usaha.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah : “Bagaimana Pelaksanaan *Community Development* BNNP DIY Melalui Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif?”

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa yaitu:

- a) Melatih *softskill* dan *hardskill* yang dimiliki oleh mahasiswa.
- b) Melatih mental dan rasa percaya diri yang dimiliki oleh mahasiswa serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya organisasi disuatu lingkungan kerja.
- c) Memperoleh gambaran secara umum tentang bagaimana fungsi *public relations* dilaksanakan disuatu instansi milik pemerintah melalui proses pembelajaran selama menjalani masa praktik kerja lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d) Dapat membandingkan ilmu yang didapat selama menjalani masa perkuliahan dengan praktek langsung dilapangan.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari dilaksanakannya praktik kerja lapangan yaitu

- a) Menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir melakukan praktik kerja lapangan sebagai salah satu syarat kelulusan.
- b) Mengimplementasikan secara langsung ilmu yang sudah didapat selama mengikuti pembelajaran dari semester 1 hingga semester 5.
- c) Mengamati secara langsung bagaimana fungsi humas dilaksanakan didalam instansi pemerintah.

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

a. Tempat

Instansi/Perusahaan : BNNP DIY
Alamat : Perkantoran Selatan Purawisata, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

b. Waktu

Tanggal : 1 Februari 2019 – 31 Maret 2019 (Dua Bulan)
Bagian : Admin dan Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (P2M)
Waktu : Senin – Jumat (Lima Hari Kerja)
Pukul : 08.00-16.00 (Senin – Kamis) dan 08.00-16.30 (Jumat)

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis selalu mencatat setiap kegiatan selama PKL (*Daily Report*) dan juga mengumpulkan

data sebagai bahan materi yang diperlukan untuk menulis laporan. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang dilakukan penulis dengan mengamati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengamati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh subbidang Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas) bidang P2M.
- b. Mempelajari fungsi dan peran humas yang dilakukan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat bidang P2M.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara agar mengetahui informasi secara lebih mendalam guna memenuhi informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan laporan PKL. Wawancara yang dilakukan sebagai berikut :

a. Wawancara Formal

Wawancara formal yang dilakukan dengan cara menanyakan materi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan kepada pembimbing, yaitu Santy Dwi Kristiana, SKM selaku humas bidang pemberdayaan masyarakat dan Bambang Wiryanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY bertempat di Gedung BNNP DIY dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pembimbing

b. Wawancara Non Formal

Wawancara non formal yang dilakukan penulis dengan cara bertanya kepada pembimbing yaitu Santy Dwi Kristiana, SKM selaku humas bidang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dikala senggang maupun via *whatsapp* tanpa harus menentukan waktu, tempat.

3. Kajian pustaka

Menurut Pohan dalam Prastowo (2012: 81) kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat.

4. Dokumentasi

Menurut KBBI, definisi dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. PENEKASAN JUDUL

Salah satu kegiatan yang dilakukan seorang praktisi *public relations* adalah kegiatan *community development*, dalam konsep ini *public relations* berperan sebagai pelaksana serangkaian program yang telah disusun dan direncanakan dalam upaya untuk membantu masyarakat atau komunitas memperbaiki kehidupan dari segi ekonomi, segi sosial, dan dari segi budaya. Sehubungan dengan judul yang dipilih oleh penulis, penulis akan menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi dan mendukung penulisan laporan. Judul laporan yang diangkat oleh penulis yaitu “Pelaksanaan *Community Development* Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Program Pemberdayaan Alternatif ”

Community development merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah instansi pemerintah dalam upaya membantu masyarakatnya berswadaya. Pendekatan *communiy development* merupakan turunan dari konsep *corporate social responsibility* yang menjadi induk dari kegiatan tersebut. Program *corporate social responsibility* merupakan salah satu tugas wajib seorang praktisi *public relations* yang harus dilaksanakan dalam upaya membangun citra yang baik bagi perusahaan. Dalam proses pelaksanaan program *community development* memiliki satu tujuan utama yaitu membimbing publiknya untuk berswadaya melalui serangkaian proses yang dilakukan.

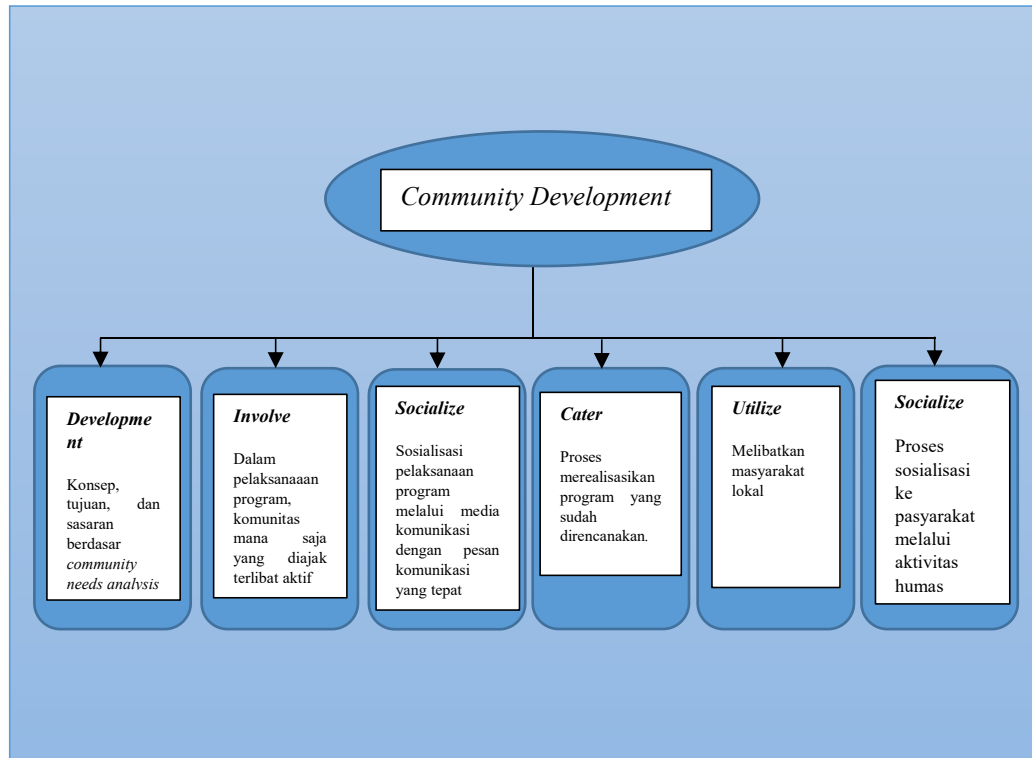
Program pemberdayaan peran serta masyarakat dan program pemberdayaan alternatif merupakan program tahunan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui subbidang Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan bagian dari *community development*. Dalam pelaksanaan kegiatan *community development*, subbidang pemberdayaan masyarakat mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat. Disini peran aktif seorang praktisi *public*

relations sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga hubungan baiknya dengan seluruh *stakeholder* dan publiknya.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan *community development* ini ada dua, yaitu dari sisi komunitas atau publiknya dan dari sisi instansi pemerintah. Dari sisi komunitas atau publiknya, kegiatan ini berfungsi sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan dalam membantu memperbaiki kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan budaya serta membimbing masyarakat untuk menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan bagi instansi atau perusahaan, kegiatan ini selain sebagai bentuk implementasi dari kegiatan *corporate social responsibility* yang harus dilaksanakan di setiap perusahaan atau instansi tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan perusahaan atau instansi kepada publiknya. Selain itu, kegiatan *community development* juga dianggap sebagai sarana untuk menciptakan citra positif perusahaan atau instansi dimata publiknya.

Pelaksanaan kegiatan *community developmet* BNNP DIY dapat dilihat melalui prinsip-prinsip sebagai berikut : *Development* merupakan pengembangan konsep, tujuan, dan sasaran program berdasarkan *community needs analysis*, *Involve* merupakan dalam pelaksanaan program melibatkan komunitas agar berpartisipasi secara aktif, *Socialize* merupakan segenap program yang direncanakan, disosialisasikan melalui media dengan pesan komunikasi tepat, *Cater* merupakan program yang disajikan untuk direalisasi harus sesuai dengan kebutuhan komunitas. Instansi pemerintah harus mengakomodasi tentang *needs*, *desiers*, dan *wants* yang muncul dalam komunitas, prinsip *Utilize* merupakan prinsip dimana dalam pelaksanaan program, instansi pemerintah diharapkan melibatkan komunitas lokal, *Socialize* merupakan tahap sosialisasi program *community development* kepada publiknya secara luas melalui aktivitas humas.

Gambar 2.1 Konsep *community development*



Dengan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan nantinya akan diukur seberapa efektifnya dan seberapa berhasilnya kegiatan *community development* yang dilaukan oleh seorang praktisi *public relations*.

B. LANDASAN TEORI

1. *Public Relations*

a) Definisi *Public Relations*

Public Relations (PR) atau yang lebih dikenal sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi yang non-komersial. Humas terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggarakan antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.

Menurut definisi kamus terbitan *Institute of Public Relations* (IPR), terbitan bulan November 1987 “humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayaknya. Jadi, humas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau propaganda tertentu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dari kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan (biasa disebut sebagai khalayak atau publik).

Ngurah (1999) menyimpulkan bahwa pengertian PR sesungguhnya adalah *relations with public*. Ketika organisasi berbicara *relations with public*, maka harus dipahami pula bahwa masing-masing pihak yang sedang membangun hubungan memiliki kepentingan. Organisasi memiliki kepentingan, begitu juga dengan publik. Hubungan yang ada di dalamnya harus terlaksana dengan baik, demikian juga dengan dunia luar karena organisasi

mengandung arti: ia harus utuh, bersatu dan harmonis dalam mencapai tujuan. Hubungan kedua belah pihak akan berjalan harmonis bila masing-masing dapat saling mempertimbangkan kepentingan pihak lain.

Definisi umum tentang Public Relations tersebut kemudian disimpulkan lebih spesifik lagi, yaitu public relations merupakan seni (*arts*) dan gabungan dari disiplin ilmu manajemen, komunikasi, psikologi, sosial dan marketing, untuk membentuk agar perusahaan atau lembaga, gagasan atau ide yang ditawarkan, nama, dan produknya menjadi disukai dan dapat dipercaya oleh publiknya. Dalam hubungannya dengan *target audience* atau *stakeholder* tersebut, dikenal tiga tipe tentang apa yang disukai dan tidak disukai, yaitu sebagai berikut.

- a. *Those who know and like you* (mengetahui dan menyukai Anda)
- b. *Those who know dan don't like you* (mengetahui dan tidak menyukai Anda)
- c. *Those who neither you nor care you* (tidak diketahui maka tidak disukai)

Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang *public relations* adalah *corporate social responsibility* yang dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat sekitar dalam membantu memperbaiki kehidupan. Selain itu bagi sebuah instansi pemerintah, kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk membangun citra yang baik untuk masyarakatnya. Konsep *community relations* ini merupakan induk dari konsep *community development*. Dalam konsep *Public Relations* lama, peran PR hanya sebatas pemberi donasi sehingga seorang praktisi *Public Relations* hanya membantu masyarakat atau komunitas dari segi finansial saja. Yang menjadi sasaran program *Corporate Social Responsibility* adalah masyarakat yang berada disekitar instansi ataupun lembaga. Namun dalam konsep *Public Relations* yang baru terdapat pengembangan

konsep dimana posisi *Public Relations* dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* tidak hanya sebagai pemberi donasi kepada masyarakat atau komunitas melainkan menempatkan masyarakat atau komunitas sebagai mitra. Selain dipandang sebagai mitra, sasaran masyarakat yang menjadi target dalam program *Corporate Social Responsibility* ini juga diperluas sehingga tidak hanya masyarakat sekitar perusahaan saja melainkan masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaan program *Community Development*, salah satu pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

b) Tujuan *Public Relations*

Tujuan public relations untuk mempengaruhi publiknya, antara lain sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakili tersebut tetap pada posisi pertama, dikenal, dan disukai. Sedangkan posisi publik yang kedua, mengenal dan tidak menyukai itu, maka pihak public relations berupaya melalui proses teknik public relations tertentu untuk dapat mengubah pandangan publik menjadi menyukai. Pada posisi publik yang ketiga, membutuhkan perjuangan keras untuk mengubah opini publik yang selama ini tidak mengenal dan tidak menyukai melalui suatu teknik kampanye PR (*PR campaign*) melalui strategi menarik perhatian (*pull strategi*) yang mampu mengubahnya, dari posisi “*nothing*” menjadi “*something*”.

Dalam konsepnya, fungsi *public relations officer* ketika menjalankan tugas dan operasionalnya, baik sebagai komunikator dan mediator, maupun organisator, menurut Prof. Drs. Onong Uchajana Effendy, M.A dalam bukunya *Hubungan Masyarakat Suatu Komunikologis* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992) adalah sebagai berikut.

- a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.
- b. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal.
- c. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi.
- d. Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.
- e. Operasionalisasi dan organisasi public relations adalah bagaimana membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai peran utama public relations yang pada intinya adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya.
- b. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.
- c. Peran *back up management*, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.
- d. Membentuk *corporate image*, artinya peran public relations berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya

c) Fungsi *Public Relations*

Kalau dipaparkan secara rinci, fungsi utama *public relations* tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bertindak sebagai *communicator* dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik (*two way traffic reciprocal*)

communication). Dalam hal ini, di satu pihak melakukan fungsi komunikasi merupakan bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini public (*public opinion*).

- b. Membangun dan atay membina hubungan (*relationship*) yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan eksteernal. Khususnya dalam menciptakan saling mempercayai (*mutually symbiosis*) antara lembaga/organisasi perusahaan dan publiknya.
- c. Peran *back up management*. Fungsi PR melekat pada fungsi manajemen, untuk mencapai tujuannya harus melalui rangkaian proses POAC, yaitu singkatan dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating*(penggiatan), dan *controlling* (pengawasan). Lalu diikuti unsur lain yang terlibat dalam komunikasi dua arah untuk menunjang kegiatan bagian (departemen) lainnya.
- d. Menciptakan citra perusahaan atau lembaga (*corporate image*) yang merupakan tujuan akhir dari suatu aktivitas program kerja PR *campagin* (kampanye PR), baik untuk keperluan publikasi maupun promosi. Peran public relations mencakup hubungan dengan berbagai pihak dan tidak hanya sekedar berbentuk *relations* arti sempit, karena *personal relations* mempunyai peran yang cukup besar dalam melakukan kampanye public relations. Bagaimana meningkatkan kesadaran, pengertian dan pemahaman tentang aktivitas perusahaan atau lembaga, termasuk membentuk sikap yang menyenangkan (*favoritable*), iktikad baik (*good will*), toleransi (*tolerance*), saling pengertian (*mutual understand*), memepercayai (*mutual confidence*), saling menghargai (*mutual appreciation*), dan pada akhirnya akan menciptakan citra baik (*good image*).

d) Peran *Public relations*

Peran seorang praktisi PR atau Hubungan Masyarakat dalam suatu instansi atau organisasi dibagi menjadi empat, yaitu

a. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Seorang praktisi PR yang bekerja sebagai teknisi komunikasi umumnya hanya bekerja sesuai perintah dari atasan. Biasanya praktisi PR pada tingkat ini mengerjakan tugas di bidang jurnalistik dan komunikasi dasar. Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh PR pada level teknisi komunikasi adalah membuat dan menyunting *press release*, mengelola laman milik perusahaan atau organisasi, membuat *annual report*, mempersiapkan teks pidato dan mengerjakan tugas teknis lainnya.

b. *Expert Prescriber*

Seorang praktisi PR pada tingkat ini berperan sebagai seorang konsultan, praktisi PR dianggap sebagai seorang yang dapat dipercaya oleh manajemen sebagai pemecah masalah atau isu yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Praktisi PR pada tingkatan ini menjalankan tugasnya yaitu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi perusahaan atau organisasi, mengembangkan rancangan program, dan memehngang tanggung jawab penuh dalam mengimplementasikan program yang telah dirancang sebelumnya. Keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan merupakan tanggungjawab penuh seorang *expert prescriber*.

c. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Peran fasilitator komunikasi bagi seorang praktisi adalah sebagai pendengar yang baik dan peka serta *broker* (perantara komunikasi). Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara, *interpreter*, dan mediator antara instansi

atau perusahaan dengan publiknya. Praktisi pada tingkat ini harus menjaga komunikasi dua arah yang baik dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan yang ada dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka.

d. Fasilitator Pemecah Masalah (*Problem Solving Facilitator*)

Seorang praktisi pada tingkat ini akan bekerjasama dengan jajaran manajerial untuk memecahkan masalah sebagai bagian dari tim strategis. seorang praktisi PR yang ditunjuk biasanya mampu mempergunakan dan menunjukkan ketreampilan dan nilai dirinya dalam rangka membantu manajemen dalam hal memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

2 Humas Dalam Pemerintahan

a) Definisi Humas Dalam Pemerintah

Public relations dalam pemerintah biasanya disebut sebagai pejabat *public affairs* adalah penghubung penting antara pemerintah dengan masyarakat. Humas dalam pemerintah memiliki fungsi yang sama dengan humas pada umumnya yaitu fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien yang bertujuan untuk menciptakan citra baik instansi pemerintah dimata masyarakat. Dalam humas pemerintahan, pejabat humas bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah satu yang menjadi tugas utama sebagai humas dalam lembaga pemerintahan menjadi penyedia informasi publik.

Selain sebagai salahsatu saluran informasi publik, humas juga merupakan perantara komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dengan publiknya. Komunikasi dua arah yang baik ini merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan oleh seorang praktisi humas membangun citra yang baik serta mendapatkan

kepercayaan dari publiknya. Secara garis besar, humas dalam pemerintahan merupakan fungsi khusus manajemen dimana seorang praktisi humas dalam pemerintahan membantu memelihara komunikasi yang baik melalui komunikasi dua arah (*two way communication*) sehingga tercapai rasa saling pengertian dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan publiknya.

b) Peran Humas Dalam Pemerintah

Peran utama seorang praktisi humas dalam pemerintahan adalah sebagai pejabat yang memberikan informasi publik. Dalam hal ini sudah merupakan kewajiban sebagai seorang praktisi humas dalam pemerintahan menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang aktivitas, kebijakan, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah secara *transparan*, terbuka, jujur dan objektif. Peran humas dalam pemerintah merupakan sebagai perantara komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan publiknya. Pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan membutuhkan penyambung informasi yang baik. Dan masyarakat sebagai objek yang menikmati hasil kebijakan juga harus mengetahui sumber informasi secara tepat. Sehingga terciptalah komunikasi yang baik antara keduanya

c) Tujuan Humas dalam pemerintahan

Dalam melakukan tugasnya sebagai humas dalam lembaga pemerintahan, ada beberapa tujuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan humas dalam instansi pemerintahan adalah sebagai berikut

1. Memberikan informasi penting tentang kegiatan dilingkungan pemerintah.
2. Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah. Contohnya mensosialisasikan dan mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dilakukan pemerintah.

3. Mendorong warga untuk mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah.
5. Mengelola informasi internal dilingkungan pemerintah.
6. Memfasilitasi hubungan media massa. Menjaga hubungan baik dengan media merupakan salah satu poin penting yang harus dilakukan oleh seorang praktisi PR karena media merupakan sarana yang dianggap paling ampuh untuk menyebarkan informasi yang juga berpengaruh dengan citra yang timbul bagi instansi.
7. Membangun komunitas dan bangsa.

3 *Community Development*

Community development merupakan salah satu konsep dari induk konsep *corporate social responsibility*. Inti dari kedua konsep tersebut adalah untuk membantu masyarakat sekitar dalam upaya mengembangkan diri sehingga masyarakat dapat berswadaya.

a) Definisi *Community Development*

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimaksud dengan *community development* yaitu “*as the process by which the efforts of the people themselves are united with those governmental authorities to improve the economic, social and culture conditions of communities, to intergrade these communities into the life of nations, and to enable them to contribute fully to nations progress.*” (Luz. A. Einsiedel 1968:7). Menurut pemaparan *community development* menurut PBB menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan suatu rangkaian proses dimana usaha-usaha atas potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya serta memberdayakan

masyarakat agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Community development merupakan proses yang berkesinambungan, artinya kegiatan ini dilaksanakan secara tersusun secara sistematis dan dilaksanakan tahapan demi tahapan. Dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap tidak lanjut dan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini menekankan pada prinsip kemandirian, artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kesadarannya, industri harus dapat membawa komunitas menjadi lebih mandiri tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada (Rudito dalam Rudito & Budimanta, 2003:28)

Ada tiga faktor utama alasan mengapa *community development* dianggap perlu dilaksanakan oleh instansi, yaitu :

1. Izin lokal

Izin lokal merupakan hal mutlak yang diperlukan oleh perusahaan. Izin lokal dalam konteks ini adalah adanya usaha untuk melibatkan komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas untuk menghasilkan keuntungan bagi bersama.

2. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan

Kemampuan beradaptasi perusahaan dengan komunitas memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan citra yang berimplikasi dengan adanya peluang usaha baru.

3. Sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama

Sejumlah program *community development* yang diselenggarakan, diintegrasikan dengan model kebudayaan nasional.

Ruang lingkup program *community development* sebagai berikut :

1. *Community services*, merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan umum.
2. *Community empowering*, adalah program yang berkaitan dengan membrikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.
3. *Community relations*, yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.

b) Karakteristik *Community Development*

Menurut Harrison (W. David Harrison, 1995), karakteristik *community development* sebagai berikut.

1. Praktek *Community Development* memiliki fokus secara luas pada tujuan partisipasi masyarakat.
2. Praktek *Community Development* meliputi penemuan tujuan-tujuan yang biasanya terdapat dalam masyarakat.
3. Praktek *Community Development* hampir selalu melibatkan organisasai, dan khususnya berkenaan dengan menolong anggota masyarakat mengembangkan cara baru untuk menjaga keberfungsian organisasi.

Menilik dari karakteristik *community development* diatas, hal yang paling penting dari konsep pengembangan masyarakat adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Keikutsertaan masyarakat ini dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan *sense of belonging* atau perasaan saling memiliki untuk bekerja sama, saling memahami peran serta tugas masing-masing didukung dengan keterlibatan pemerintah dan perusahaan dalam bentuk

program kesejahteraan sosial. Peran organisasi sangat penting sebagai wadah aspirasi dan penggerak masyarakat dalam menciptakan perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera

c) Prinsip *Community Development*

Dalam pelaksanaan program *community development*, ada 6 prinsip yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut (Rahman, 2009:34). Enam prinsip tersebut adalah sebagai berikut

a. *Development* (Pengembangan)

Dalam prinsip *development* ini merupakan proses dimana dilaksanakan pengembangan konsep, pengembangan tujuan, dan pengembangan sasaran. Prinsip *development* ini mengacu analisis kebutuhan komunitas (*community needs analysis*). Proses analisis kebutuhan komunitas didapatkan dari hasil survei maupun diskusi yang dilaksanakan guna mendapatkan poin-poin yang sudah disebutkan diatas. Prinsip ini juga merupakan proses pematangan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. *Involve* (melibatkan)

Dalam *community development*, komunitas yang dilibatkan dalam didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga tingkat partisipatif komunitas yang dilibatkan cenderung tinggi sehingga proses *community development* dianggap berhasil dilaksanakan. Dalam prinsip ini, ada tiga jenis komunitas yang dilibatkan yaitu

I. Komunitas Lokal

Local community atau komunitas lokal adalah *a group of interacting people sharing an environment. In human communities, intent, belief, resources, preferences, needs, risks, and a number of other conditions may be present and common, affecting the*

identity of the participants and their degree of cohesiveness. Secara garis besar, komunitas lokal merupakan sekelompok orang yang berinteraksi dalam suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat berbagai faktor seperti niat, kepercayaan, sumberdaya, keberpihakan, kebutuhan, risiko, dan kondisi lain mungkin ada dan bersifat umum, yang mempengaruhi identitas individu dan tingkat keterpaduan individu di dalam kelompok.

II. Komunitas Perusahaan

Komunitas perusahaan merupakan sekelompok orang yang tergabung atau bekerja pada satu badan usaha yang sama. Hubungan yang terbentuk dalam komunitas ini didominasi dengan hubungan antar karyawan atau pegawai disatu badan usaha yang sama.

III. Komunitas Pendatang

Komunitas yang terbentuk disuatu lingkungan yang anggota komunitasnya terdiri dari individu yang bukan merupakan penduduk asli dilingkungan tersebut atau bertempat tinggal disuatu lingkungan yang bersifat sementara.

c. Socialize

Prinsip *socialize* atau sosialisasi merupakan proses dimana program yang telah direncanakan selanjutnya disosialisasikan kepada publiknya melalui media dengan pesan komunikasi yang tepat. Dalam prinsip ini, strategi komunikasi yang baik dan benar sangatlah diperlukan. Strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan skema dalam melakukan komunikasi sehingga dapat mencapai tujuan dengan efektif. Strategi komunikasi pada umumnya mencakup proses perencanaan (*planning*) dan manajemen (*manajemen*)

untuk mencapai tujuannya melalui skema yang dirancang. Menurut Effendy (2003:301), strategi komunikasi merupakan panduan dan perencanaan komunikasi untuk mencapai satu tujuan. Strategi komunikasi mencakup segala upaya yang dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan publiknya.

d. *Cater*

Prinsip *cater* merupakan prinsip dimana proses pemenuhan kebutuhan (*give what is needed*) dilakukan setelah terlaksananya prinsip-prinsip sebelumnya seperti *development*, *involve*, dan *socialize* telah selesai dilaksanakan. Prinsip *cater* merupakan prinsip pelaksanaan atau realisasi program yang sudah direncanakan. Proses realisasi program haruslah sesuai dengan kebutuhan komunitas yang ada dilapangan mencakup *need* (kebutuhan), *desire* (keinginan), *wants* (kemauan), dan *interest* (ketertarikan) yang muncul didalam kebutuhan komunitas.

e. Utilize

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, diharapkan orang-orang yang terlibat didalamnya merupakan orang-orang atau masyarakat lokal.

f. Socialize

Selain sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *community development*, sosialisasi program juga perlu dilakukan kepada pihak luar yang tidak terlibat dalam program. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan melalui aktivitas humas seperti pemberitaan di media massa.

d) Tahapan Pelaksanaan *Community Development*.

Menurut *United Nations* (1996:83-92) dalam pelaksanaan *community development*, ada beberapa tahapan yang perlu

dilalui supaya pelaksanaan kegiatan *community development* dapat berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan tersebut meliputi

a. *Getting to know the local community*

Mengetahui tentang karakteristik masyarakat lokal yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan komunitas satu dengan komunitas yang lainnya. Mengetahui yang dimaksud yaitu untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik yang baik antara petugas dengan masyarakat.

b. *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan atau mengumpulkan informasi mengenai masyarakat setempat atau komunitas lokal. Informasi tersebut berupa data faktual menurut umur, gender, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *custom*, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

c. *Identifying the local leaders*

Mengidentifikasi tokoh pemimpin dalam masyarakat merupakan poin penting dalam pelaksanaan program *community development*. Karena tokoh pemimpin dalam lingkungan masyarakat memiliki peran dan pengaruh yang cukup kuat dalam menggerakkan massanya dalam hal ini menggerakkan anggota komunitas yang dipimpinnya

d. *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam suatu kelompok masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka memiliki

masalah yang perlu dipecahkan secara bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

e. *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat dimaknai sebagai proses merangsang masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dalam suasana kebersamaan.

f. *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan, setelah ditemukan maka masalah yang paling menekan inilah yang diutamakan untuk dilakukan pemecahan masalahnya.

g. *Fostering self-confidence*

Tujuan utama dari program pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian masyarakat. Rasa percaya diri masyarakat inilah yang menjadi modal utama masyarakat untuk berswadaya.

h. *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program yang ditetapkan perlu diberikan skala prioritas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala yang tinggi yang didahulukan pelaksanaannya.

i. *Recognition of strengths and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat

dimobilisasi untuk mencegah permasalahan dan memenuhi kebutuhan.

j. Helping people to continue to work on solving their problem

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar dapat memecahkan masalahnya secara berkelanjutan.

k. Increasing people ability for self-help

Salah satu tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian pada masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang dapat memecahkan masalahnya sendiri sehingga kemampuan masyarakat harus selalu ditingkatkan dalam upaya berswadaya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

1. Profil Lembaga

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), merupakan Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi DIY. Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal yang sistem kerjanya berhubungan langsung dengan BNN RI, bukan dibawah naungan Pemerintah Daerah. Organisasi BNNP tertuang dalam peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Perbedaan Badan Narkotika Nasional Kepolisian Republik Indonesia terdapat di wewenang dalam penyelidikan narkoba. Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu: Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia bertugas sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri sehingga polisi lebih mengarah ke hukuman pidana (Wicaksono, 2015).

2. Sejarah BNNP DIY

Sejarah BNNP DIY Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak lanjut amanat Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 dan pasal 65, dibentuklah 30 Badan Narkotika Provinsi (BNNP) yang termasuk di dalamnya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Pada tanggal 20 April 2011 telah dilantik 30 Kepala BNNP termasuk Kepala BNNP DIY, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pada awal terbentuknya BNNP DIY, jumlah sumberdaya manusia yang ada hanya delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan usulan Gubernur DIY.

Kedelapan personel tersebut mengisi jabatan struktural sebagai 1 orang Kepala BNN (Drs. Budiharso, M.Si), 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha (Dra. Sri Rahayu), 1 orang Kepala Bidang Pencegahan (V. Bambang Budi Istiarjo, SE), 3 orang Kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha (Drs. Aryanto Hendro Supratoro), Kepala Subbagian Administrasi pada Bagian Tata Usaha (Ari Miarsiningsih, BA), Kepala Subbagian Logistik pada Bagian Tata Usaha (Indartiningsih, BA) 2 Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Desiminasi Informasi pada Bidang Pencegahan (Suharyono, SIP), Kepala Seksi Advokasi pada Bidang Pencegahan (Aris Subagya, S.Sos).

Jumlah tersebut secara bertahap terus bertambah, hingga Mei 2013 terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai

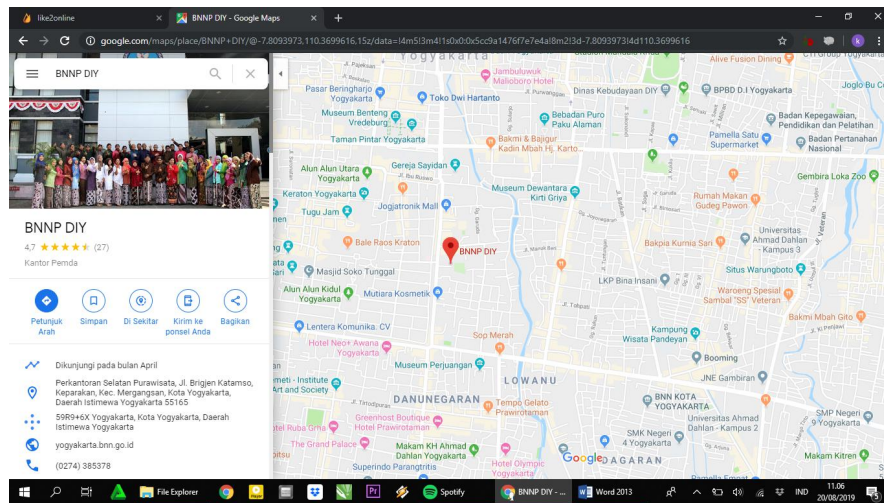
Daftar Susunan Personel sekitar 190 orang. Dari kondisi personel tersebut maka masih terbuka peluang untuk menerima PNS yang menginginkan mengabdikan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNNP DIY, baik untuk status dipekerjakan / ditugaskan, maupun mutasi. Khusus untuk memenuhi kebutuhan personel di bidang pemberantasan dipersyaratkan yang telah memiliki kualifikasi penyidik (Polri maupun PPNS).

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan, menempati dua ruangan di Biro Umum, Pemerintah Daerah DIY bergabung menjadi satu dengan Badan Narkotika Provinsi yang telah terbentuk dengan keputusan Gubernur. Setelah mendapatkan alokasi anggaran pada akhir bulan September 2011 maka mulai bulan Oktober mengontrak sebuah rumah di Mergangsan hingga 5 Maret 2012.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program vertikalisasi BNN, pada tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY diawali adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 2/KSP/II/2011 dan Nomor: SKB/5/II/2011/BNN tentang Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamsa, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah + 1.380 m², berstatus Pinjam Pakai yang secara teknis setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai. Sedangkan luas bangunan 1.274 m².

Gambar 3.1 Denah lokasi berdasarkan Google Maps



Sumber : Google Maps

Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota Yogyakarta ini mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU No 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa “BNN Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi”, Selain itu pemilihan tempat ini juga mempertimbangkan segi strategis dan keamanan. Lokasi ini berada di tengah Kota Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait, mudah dijangkau oleh BNK/BNNK dan masyarakat dari segala penjuru DIY, diperkirakan lebih aman dari bencana alam gempa dan bahaya merapi.

Untuk pelaksanaan operasional P4GN gedung ini terdapat dua bagian, yaitu 1. gedung utama, pos jaga dan gudang; 2. gedung tahanan. Fasilitas gedung yang disediakan antara lain :

1. Di Gedung Utama, Pos Jaga dan Tahanan seluas 988 m²,, meliputi:
 - a. Ruang kerja pejabat struktural Eselon II A, IIIA, IV A beserta staf dan Tim Penindakan seluas 464 m².
 - b. Lobby, Ruang Rapat, Ruang Penyidikan, Ruang Arsip, Ruang Gudang, Toilet, Pantry dan Ruang makan, Koridor/sirkulasi udara, Ruang Genset, Ruang Penyimpanan Barang Bukti, Tangga, Pos Jaga seluas 524 m².
2. Gedung Tahanan seluas 286 m², meliputi: Ruang Tahanan pria dan wanita, Ruang pengunjung pria dan wanita.

Pembangunan Gedung BNNP DIY diprakarsai BNN Pusat, didukung oleh perencana bangunan PT. SARANA BAGYA BUMI, Surabaya dan dilaksanakan oleh PT. PITACO MITRAPERKASA, Jakarta, yang diawasi oleh Konsultan Manajemen PT. ARKONIN, Jakarta. Adapun total nilai pembangunan gedung Kantor BNNP DIY sebesar Rp7.899.961.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang berasal dari anggaran APBN yang tertuang dalam DIPA BNN Tahun 2011.

Gedung BNNP DIY yang telah dibangun dengan megah mulai ditempati sebagai kantor BNNP mulai hari Senin tanggal 5 Maret 2012. Dengan berdirinya Gedung Kantor BNNP DIY ini Kepala BNNP DIY pada saat peresmian mengharapkan agar Gedung tersebut dapat sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; sebagai pusat informasi dan tukar pikiran dalam bidang pencegahan dan penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika, serta dalam bidang pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika juga diharapkan sebagai pusat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam mewujudkan visi, misi, strategi BNNP untuk mencapai target P4GN di DIY.

Untuk meningkatkan kapasitas rehabilitasi di wilayah DIY pada tahun 2015 di BNNP DIY didirikan Klinik Pratama yang diberi nama “Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY”. Bangunan klinik berada di sisi belakang gedung BNNP DIY bersebelahan dengan gedung ruang tahanan BNNP DIY. Klinik secara resmi beroperasi pada bulan September 2015 setelah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan nomor 503/6501 tertanggal 07 September 2015. Klinik Prataman Seger Waras hanya melayani rehabilitasi rawat jalan, sedangkan untuk rehabilitasi rawat inap dirujuk ke tempat rehabilitasi rawat inap yang ada di DIY

3. Visi BNNP DIY

Visi BNNP DIY yaitu Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Misi BNNP DIY

Misi BNNP DIY yaitu Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5. Kedudukan BNNP DIY

- I. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- II. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- III. BNNP dipimpin oleh Kepala.
- IV.

6. Tugas BNNP DIY

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah Provinsi. Adapun Tugas BNN adalah:

- I. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- II. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- III. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan

- penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- IV. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - V. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - VI. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - VII. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - VIII. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - IX. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

7. Fungsi BNNP DIY

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP DIY menyelenggarakan fungsi:

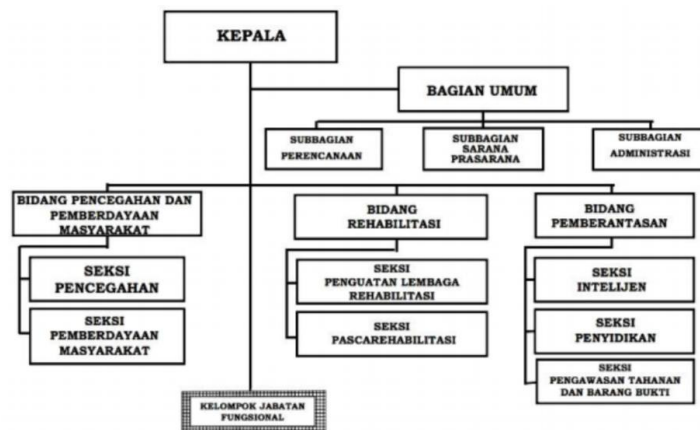
- I. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

- II. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.
- III. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.
- IV. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.
- V. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.
- VI. Pelayanan administrasi BNNP, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

8. Struktur Organisasi BNNP DIY

Struktur Organisasi BNNP DIY Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi



Sumber : BNNP DIY

Keterangan :

- 1) Kepala BNNP DIY
- 2) Bagian Umum (Sub Bag Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Sarana dan Prasarana) dan fungsional umum yang terdiri jabatan perencana program dan anggaran, pengolah data, penata usaha barang milik/kekayaan negara, pengadministrasi umum, bendahara pengeluaran, penata laporan keuangan.
- 3) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri penyuluh narkoba, pengolah data, dan pengadministrasi umum.
- 4) Bidang Rehabilitasi, (Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi) dan Seksi Pascarehabilitasi), dan staf yang terdiri dari dokter, perawat, asisten konselor, fasilitator rehabilitasi, pengadministrasi umum.
 - a. Bidang Pemberantasan, yang terdiri dari analisis intelijen, pengolah data, pengadministrasi umum, penyidik, petugas penindakan, petugas pengejaran, pengawas barang bukti.

Pada tanggal 19 Januari tahun 2019, BNNP DIY memberentuk tim khusus humas yang berjumlah 13 orang. Anggota tim kehumasan berisikan perwakilan dari bidang-bidang yang ada di BNNP DIY Berikut merupakan nama anggota Tim kehumasan :

Tabel 3.1 Daftar Nama Tim Kehumasan

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Setiya Pranata, M. Eng.	Kabag Umum
2.	Yoce Taribino, S.Si. M.pd	Kasubbag Perencanaan
3.	Sri Hastutuik , S.Si, M.si.	Kasubbag Admin

4.	Ari Sahbana, S.Kom	Analisis Intelejen Pratama
5.	Herlina Rahmawati, SIP	Penyuluh Anti Narkoba Pertama
6.	Dr. Windy Elvasaari	Dokter Sie PLR
7.	Dwi Fitriyaningrum, S. Kom	Pengolah Data Sie Pendidikan
8.	Santy Dwi Kristina, SKM	Penyuluh Anti Narkoba Pratama Sie Dayamas
9.	Wahyu Rahmawati, SE	Penyusun Perencana Program dan Anggaran subbag Perencanaan
10.	Rizka Amelia, A.Md.	Penata laporan keuangan subbag administrasi
11.	Linda Catur Wulandari, A.Md, Far	Fasilitator Sie Pasca Rehabilitasi
12.	Anita Dwi Nurhayati, AMK	Perawat sie PLR
13.	Seto Aji, S. Pi.	Pengadministrasi Umum Sie Penyidikan

Sumber : BNNP DIY

9. Gambaran umum bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di BNNP DIY, penulis mendapatkan banyak tugas dari bidang P2M. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 2 subbidang, yaitu : Subbidang Pencegahan dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat. Tugas utama Bidang P2M adalah

melakukan diseminasi informasi mengenai kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan menggerakkan potensi masyarakat untuk proaktif dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Subbidang Pencegahan memiliki tugas utama yaitu melakukan advokasi dan diseminasi informasi mengenai kegiatan P4GN. Sedangkan subbidang pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas utama untuk melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif dalam upaya mengajak peran serta aktif masyarakat dalam memerangi aksi penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten, dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi kegiatan P4GN di subbidang pencegahan pada wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif di subbidang pemberdayaan masyarakat dengan wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Melakukan persiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dalam subbidang pencegahan dan subbidang pemberdayaan masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten yang ada di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Melakukan persiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam subbidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Logo Perusahaan

Gambar 3.3 Logo BNNP DIY



Sumber : BNNP DIY

Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/37/IX/2006/BNN

a. Makna bentuk

- Lingkaran berwarna emas menjelaskan satu kesatuan yang tidak memberikan celah bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- Bintang, merupakan simbolisasi cita-cita luhur bnn untuk mewujudkan masyarakat indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Tulisan badan narkotika nasional republik indonesia, memberikan pemahaman bahwa bnn merupakan sebuah institusi pemerintah yang memiliki tugas khusus dalam menanggulangi permasalahan narkoba.
- Garuda, melambangkan komitmen BNN terhadap tekad pemerintah republik indonesia dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba.
- Huruf BNNP DIY, menunjukkan terminologi badan narkotika nasional wilayah daerah istimewa Yogyakarta

b. Makna Warna

- Warna hitam, memiliki arti keseriusan dan ketegasan.
- Warna kuning gading, memiliki kerativitas dan inovatif makna kecerdasan dan antusiasme.
- Warna biru tua dan biru muda, artinya adalah lambang universalisme.
- Warna putih, artinya keseluruhan cita-cita

BAB VI

KEGIATAN PKL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Pada bab ini, penulis akan membahas aktivitas yang dilaksanakan selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan(PKL) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(BNNP DIY) pada 1 Februari hingga 5 April 2019. Kegiatan PKL dilakukan di dua bidang yang berbeda di BNNP, pada tanggal 1 Februari hingga 8 Maret 2019 di bagian Admin dan tanggal 11 Maret hingga 5 April 2019 di Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat(P2M).

Berikut susunan kegiatan yang dilakukan penulis selama PKL, adalah sebagai berikut :

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No.	Hari, tanggal	Tempat	Kegiatan
1	Jum'at, 1 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none">• Diperkenalkan dengan beberapa staff Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.• Diberi informasi tentang tata cara dan jam operasional selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
2	Senin, 4 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none">• Membuat template untuk hari kanker internasional• Membuat caption untuk postingan di instagran
3	Rabu, 6 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none">• Membuat template layout untuk instagram BNNP DIY

4	Kamis, 7 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi mengenai konsep company profile untuk BNNP DIY • Membuat naskah sesuai dengan hasil diskusi • Membuat slide presentasi mengenai company profile •
5	Jumat, 8 Februari 2019	-	Ijin
6	Senin, 11 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi mengenai konsep company profile untuk BNNP DIY • Menulis naskah company profile BNNP DIY
7	Selasa, 12 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Berdiskusi mengenai konsep company profile untuk BNNP DIY • Menulis naskah company profile BNNP DIY
8	Rabu, 13 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkosnultasikan hasil konsep company profile BNNP DIY • Merevisi konsep company profile BNNP DIY sesuai dengan masukan yang ada.
9	Kamis, 14 Frebuari	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Merevisi konsep company profile BNNP DIY sesuai

	2019		<p>dengan masukan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendengarkan revrensi dari rekaman ILM BNNP DIY
10	Jumat, 15 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Liputan kegiatan BNNP DIY(kegiatan piates, sosialisasi haji dan umroh, dan kegiatan Dharma Wanita) • Mengolah foto dan membuat caption untuk di post di IG.
11	Senin, 18 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan naskah company profile dan merevisi ppt “peran humas dalam kegiatan PR lembaga”
11 12	Selasa, 19 Februari 2019	-	Ijin
13	Rabu, 20 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapatkan pekerjaan secara spesifik dikarenakan pembimbing sedang mengikuti seminar tentang narkoba di Hotel Ina Garuda
14	Kamis, 21 Februari 2019	-	Ijin
15	Jumat, 22 Februari 2019	-	Ijin
16	Senin, 25 Februari 2019	-	Ijin
17	Selasa, 26	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat poster dan caption

	Februari 2019		untuk hari gizi nasional 2019
18	Rabu, 27 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Liputan rapat sinergitas BNNP DIY dengan beberapa lembaga pemerintah • Menyunting foto dan membuat caption untuk di post di Instagram
19	Kamis, 28 Februari 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat poster untuk memperingati hari Serangan Umum 1 Maret. • Membuat caption untuk Postingan Instagram.
20	Jumat, 1 Maret 2019	-	Ijin

21	Senin, 4 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Meringkas laporan kegiatan menjadi 1 dokumen
22	Selasa, 5 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Meringkas laporan kegiatan menjadi 1 dokumen
23	Rabu, 6 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapatkan perintah khusus dan hanya mengerjakan hal-hal biasa seperti fotocopy dan menyelesaikan dokumen
24	Kamis, 7 Maret	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapatkan perintah khusus dan hanya mengerjakan hal-hal biasa seperti fotocopy

	2019		dan menyelesaikan dikumen
25	Jumat, 8 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mendapatkan perintah kusus dan hanya mengerjakan hal-hal biasa seperti fotocopy dan menyelesaikan dikumen
26	Senin, 11 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Pindah ke Bagian Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP DIY
27	Selasa, 12 Maret 2019	Kantor OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam kegiatan advokasi bagian cegah ke beberapa OPD DIY
28	Rabu, 13 Maret 2019	Kantor OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut dalam kegiatan advokasi bagian cegah ke beberapa OPD DIY
29	Kamis, 14 Maret 2019	Ayam Goreng “Bu Hartin” Jl. Raya Wates – Jogja Km 2 Gunung Gempal, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut dalam kegiatan Diseminasi Informasi P4GN melalui talkshow dengan tema “Bersama Kita Wujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar)” di Kabupaten Kulon Progo.

30	Jumat, 15 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan release dan mengedit hasil dokumentasi kegiatan BNNP DIY
31	Senin, 18 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat naskah Iklan Layanan Masyarakat tentang informasi rahab di BNNP DIY
32	Selasa, 19 Maret 2019	Hotel Bifa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan tentang kopi terhadap 15 orang dari daerah rawan daerah di Banguntapan, Bantul.
33	Rabu, 20 Maret 2019	Hotel Bifa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan tentang kopi terhadap 15 orang dari daerah rawan daerah di Banguntapan, Bantul
34	Kamis, 21 Maret 2019	Hotel Bifa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan tentang kopi terhadap 15 orang dari daerah rawan daerah di Banguntapan, Bantul
35	Jumat, 22 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Mngolah hasil dokumentasi kegiatan bidang P2M
36	Senin, 25	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan keperluan

	Maret 2019		untuk kegiatan tanggal 26-27 Maret 2019
37	Selasa, 26 Maret 2019	Hotel Swissbell, Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembekalan publik speaking kepada 30 ASN Kab. Kulon Progo • Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi
38	Rabu, 27 Maret 2019	Hotel Novotel, Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembekalan publik speaking kepada 30 ibu-ibu PKK di Kab. Kulon Progo • Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi
39	Kamis, 28 Maret 2019	Balai Desa Giriwungu, Panggang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti dan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi mengenai narkoba dan undang-undang narkoba di wilayah desa Giriwungu. Dengan peserta warga masyarakat sekitar desa Giriwungu
40	Jumat, 29 Maret 2019	BNNP DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan hasil dokumentasi kegiatan BNNP DIY

Sumber : Catatan pribadi penulis

Uraian dari tugas-tugas yang dilaksanakan penulis selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Mempelajari Fungsi Humas Yang dilaksanakan di BNNP DIY

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki divisi/bidang khusus Humas namun fungsi Humas tetap dilaksanakan. Di setiap bidang yang ada di BNNP DIY ditunjuk satu hingga dua orang guna menjalankan fungsi Humas Seperti mendokumentasikan kegiatan, menulis *perss release*, *csr*, mengurus media sosial, *pres conference*, dan membangun citra positif akan lembaga BNNP DIY melalui sosialisasi atau kampanye di masyarakat. Pada umumnya para “Humas” yang sudah ditunjuk me

2) Mengelola Media Sosial

BNNP DIY mempunyai beberapa media sosial yang dapat diakses oleh publik guna mendapatkan informasi, yaitu : Instagram(@BNNP_DIY), Facebook (BNNP DIY), Twitter (@BNNP_DIY), dan website (<https://yogyakarta.bnn.go.id>). Penulis diberi tugas untuk mengelola media sosial instagram. Postingan yang di bagikan di media sosial merupakan dokumentasi kegiatan dan peringatan hari-hari besar baik nasional maupun internasional. Diawali dengan mengolah foto atau poster melalui CorelDraw lalu diberi template yang berisi informasi tentang media sosial yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya untuk disertakan di foto atau poster yang akan di posting di Instagram, penulis diminta untuk menyertakan caption dan *hashtag*. Hasil dokumentasi maupun poster yang diunggah ke akun media sosial BNNP DIY dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan BNNP DIY kepada khalayak luas.

3) Mendokumentasikan Kegiatan

Selama mengikuti kegiatan Praktek kerja lapangan selama 2 bulan 5 hari, penulis dibeikan tugas untuk medokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan BNNP DIY, baik itu kegiatan internal karyawan maupun

kegiatan eksternal publik BNNP DIY. Nantinya hasil dokumentasi yang dikerjakan oleh penulis akan diolah kemudian digunakan sebagai dokumentasi untuk laporan kegiatan kepada pimpinan. Selain digunakan sebagai bukti dokumentasi kegiatan, hasil dokumentasi yang dikerjakan oleh penulis akan diunggah juga melalui media sosial milik BNNP DIY.

4) Mempersiapkan Kegiatan

Selama penulis menjalankan Praktik Kerja Lapangan di BNNP DIY, penulis juga diikut sertakan dalam persiapan kegiatan yang dilaksanakan.

5) Membuat Release untuk Laporan Internal BNNP DIY

Penulis mendapatkan tugas untuk membuat release kegiatan yang dilaksanakan di BNNP DIY yang nantinya akan menjadi laporan kegiatan kepada pimpinan pusat BNN RI. Relase yang dibuat oleh penulis disesuaikan dengan format laporan kegiatan yang ada di BNNP DIY.

B. Pembahasan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) merupakan lembaga yang bergerak dibidang pemberantasan penyalahgunaan ditingkat provinsi. Didalam kelembagaan BNNP DIY terdapat 4 bidang, yaitu Bidang Admin, Bidang Pemberantasan (Berantas), Bidang Rehabilitasi, dan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Setiap Bidang memiliki tugasnya masing-masing yang berkaitan erat dengan upaya aksi P4GN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu bidang yang ada di BNNP DIY adalah Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (P2M). Salah satu subbidang yang ada dibidang P2M adalah subbidang pemberdayaan masyarakat atau subbidang dayamas.

Subbidang dayamas memiliki dua program kerja pokok yang di dalamnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat supaya terhindar dari jeratan penyalahgunaan narkoba. Dua program tersebut adalah program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dan program Pemberdayaan Alternatif. Berikut merupakan *timeline* kegiatan dayamas tahun 2019

4.1 LIST KEGIATAN SIE DAYAMAS 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH DANA	LOKASI	KET.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT					
1	Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Bersama Instansi Pemerintah	I kali , 40 orang (ASN), moderator 1, NS 3, panitia 4	37.070.000	Hotel Cavinton	27-Feb-19
		Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba (Workshop di Instansi Pemerintah)	I kali , 30 orang (ASN), moderator 1, NS 4, panitia 3, koordinasi 2	33.930.000	Swiss-Belboutique	26-Apr-19

		Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urin	ATK, komputer suplies transport 6 orang x 3 kali	2.021.000	1. Balai Karantina Pertanian 2. Polbangtan Yogyakarta	1. 18 Februari 2019 2. 1 April 2019
		Monitoring dan evaluasi	rapat 10 orang, hanya konsumsi dan atk	810.000	dalam rencana	Minggu pertama September
2	Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Dunia Usaha/Swasta	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba (Workshop di Instansi Swasta)	2 kali , 30 orang , moderator 1, NS 4, panitia 3, koordinasi 2	67.860.000	Hotel Jambuluwuk	10-Apr-19
		Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urin	ATK, komputer suplies transport 6 orang x 3 kali	2.900.000		mgg 2 sept
		Monitoring dan evaluasi	rapat 10 orang, hanya konsumsi dan atk	810.000		mgg 4 sept

3	Program Pemberdayaan Pnggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba (Workshop di Lingkungan Masyarakat)	I kali , 30 orang , moderator 1, NS 4, panitia 3, koordinasi 2	33.930.000	Hotel Novotel	27-Apr-19
		Monitoring dan Evaluasi	rapat 10 orang, hanya konsumsi dan atk	760.000		mgg 1 okt
4	Program Pemberdayaan Pnggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan	Bimbingan Teknis Pnggiat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan	I kali, 2 HARI, 30 orang , moderator 1, NS 4, panitia 3, koordinasi 2	62.610.000		mgg 3 juli
		Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba melalui Tes Urin	ATK, komputer suplies transport 7 orang x 3 kali	3.350.000	1.	1.
		Monitoring dan evaluasi	rapat 10 orang, hanya konsumsi dan atk	810.000		mgg 2 okt
				246.861.000		

II	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN ALTERNATIF	Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Perkotaan	1 kali kegiatan kunjungan	838.000	Polda DIY	06-Feb-19
		Rapat Kerja dalam rangka Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder	1 kali kegiatan (rapat mengundang ke hotel, 30 peserta, 2 NS, 2 panitia kegiatan, 2 panitia koordinasi)	18.886.000	Fave Hotel	07-Feb-19
		Audiensi dengan Stakeholder dalam rangka Harmonisasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba	2 kali kunjungan	2.300.000	Kantor Desa Banguntapan	19 dan 28 Februari 2019
		Pembinaan Teknis bagi BNN Kab/Kota Bidang Pemberdayaan Alternatif	2 kegiatan kunjungan	900.000	BNNK Sleman BNNK Bantul	30 dan 31 Januari 2019

		Bimbingan Teknis life skill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba pada wilayah perkotaan 1	detail di RKA	60.981.000		mgg 1 maret
		Bimbingan teknis dalam rangka sinergitas program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder	rapat/seminar di hotel peserta 20 orang	13.826.000		mgg 3 maret
		Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada kawasan rawan perkotaan 1	bentuknya kunjungan	2.200.000		mgg 1 agustus
				99.931.000		

Sumber : BNNP DIY

a) Pemberdayaan alternatif

Program pemberdayaan alternatif merupakan pelaksanaan program *community development* yang dilaksanakan subbidang pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan alternatif ini merupakan bentuk kepedulian BNNP DIY melalui subbidang pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan alternatif merupakan program pelatihan yang dilaksanakan dikawasan rawan penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dilingkungan rawan tersebut.

Program pemberdayaan alternatif ini dimulai pada tahun 2016 dengan mengambil tema “*Life skill*” yang dimulai dengan pelatihan dan pemberian alat sablon dengan wilayah kerja Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan jumlah peserta pelatihan 10 orang yang merupakan perwakilan dari tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Gondokusuman. Dilanjutkan pada tahun 2017, pelatihan dilanjutkan diwilayah Desa Maguwoharjo, Kabupaten Sleman dengan jenis pelatihan pengolahan aneka keripik. Dilanjutkan pada tahun 2018, wilayah pelatihan di Desa Ngestiharjo, Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 15 orang.

Pada tahun 2019, wilayah kerja program pemberdayaan alternatif ini berada di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dengan melibatkan 15 orang peserta serta beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Banguntapan. Berikut merupakan proses yang dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan alternatif berdasarkan prinsip-prinsip *community development*.

1. *Development*

Konsep kegiatan pemberdayaan alternatif subbidang pemberdayaan masyarakat ini adalah program pelatihan “*lifeskill*”. Program ini merupakan serangkaian kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam upaya pengembangan

kapasitas dan pengembangan potensi-potensi yang ada dengan menggandeng tenaga-tenaga ahli dibidangnya. Pelatihan yang diberikan memiliki porsi yang seimbang antara teori dan praktik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memupuk kemandirian masyarakat melalui pelatihan di bidang usaha. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta memiliki keterampilan yang baru yang digali dari potensi yang dimiliki.

Program pemberdayaan alternatif ini dimulai pada tahun 2016 dengan mengambil tema “*Life skill*” yang dimulai dengan pelatihan dan pemberian alat sablon dengan wilayah kerja Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan jumlah peserta pelatihan 10 orang yang merupakan perwakilan dari tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Gondokusuman. Dilanjutkan pada tahun 2017, pelatihan dilanjutkan di wilayah Desa Maguwoharjo, Kabupaten Sleman dengan jenis pelatihan pengolahan aneka keripik. Dilanjutkan pada tahun 2018, wilayah pelatihan di Desa Ngestiharjo, Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 15 orang. Selanjutnya pada tahun 2019, program ini mengambil wilayah kerja di Kecamatan Banguntapan, Bantul.

Gambar 4.1 Kegiatan pemberdayaan alternatif BNNP DIY dari tahun 2016 - 2019



Sumber : BNNP DIY

Pada mulanya, kegiatan pemberdayaan alternatif ini dimulai dari pemetaan kawasan rawan yang nantinya akan menjadi wilayah kerja program pemberdayaan masyarakat. Dalam pemetaan kawasan rawan ini, subbidang pemberdayaan masyarakat BNNP DIY menggandeng Polda DIY dan seluruh BNNK yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai data yang dihimpun oleh Polda DIY, berikut merupakan daftar kawasan rawan berdasarkan lokasi kejadian perkara.

Tabel 4.1 Daftar wilayah rawan berdasarkan lokasi penangkapan tahun 2019 pemaparan perwakilan Polda DIY

No.	KAB/KOTA	KECAMATAN
1	Kabupaten Sleman	Kecamatan Depok
2	Kabupaten Bantul	Kecamatan Banguntapan
3	Kabupaten Sleman	Kecamatan Ngaglik
4	Kabupaten Bantul	Kecamatan Sewon
5	Kabupaten Bantul	Kecamatan Kasihan
6	Kota Yogya	Kecamatan Gondokusuman
7	Kota Yogya	Kecamatan Jetis
8	Kota Yogya	Kecamatan Wirobrajan
9	Kabupaten Bantul	Kecamatan Pajangan
10	Kabupaten Kulon Progo	Kecamatan Wates
11	Kabupaten Gunung Kidul	Kecamatan Patuk
12	Kabupaten Bantul	Kecamatan Bantul
13	Kabupaten Sleman	Kecamatan Mlati
14	Kabupaten Bantul	Kecamatan Imogiri
15	Kabupaten Gunung Kidul	Kecamatan Wonosari
16	Kabupaten Kulon Progo	Kecamatan Gamping
17	Kota Yogya	Kecamatan Kota Gede
18	Kota Yogya	Kecamatan Mergangsan
19	Kabupaten Bantul	Kecamatan Bambanglipuro
20	Kabupaten Kulon progo	Kecamatan Lendah

Sumber : BNNP DIY

Dalam proses pemetaan kawasan rawan ini, BNNP DIY menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data. Setelah dihimpun data tersebut, selanjutnya dilakukan pemetaan yang lebih rinci sesuai dengan Kabupaten/Kota. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pemetaan kawasan rawan ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada peserta rapat. Kuesioner ini bertujuan untuk pemetaan kawasan rawan berdasarkan data yang dimiliki oleh setiap BNNK dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten (BNK) yang nantinya akan dihimpun guna memetakan kawasan rawan. Selain untuk pemetaan kawasan rawan, kuesioner yang dibagikan juga berguna untuk memetakan jenis pelatihan apa yang nantinya akan dilaksanakan pada wilayah yang sudah ditentukan. Responden kuesioner berjumlah 30 orang yang seluruhnya berasal dari perwakilan BNNP dan BNNK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut merupakan tabel kawasan rawan berdasarkan hasil kuesioner. Selain pemetaan secara geografis, dilakukan pula pemetaan secara demografis. Dalam pemetaan demografis, ditemukanlah data bahwa orang yang masuk kedalam kategori rawan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang menjadi target utama dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba sehingga wilayah yang masuk kedalam kawasan rawan pada umumnya merupakan wilayah yang sebagian besarnya merupakan perguruan tinggi dan sekolah. Selain dari kalangan pelajar dan mahasiswa, orang dengan ekonomi lemah menjadi target dalam penyalahgunaan narkoba.

Tabel 4.2 Tabel pemetaan kawasan rawan berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan BNNP DIY

No.	KAB/KOTA	KECAMATAN
1	Kota	Umbulharjo
		Wirobrajan
		Tegalrejo
		Kraton
		Mergangsan
2	Sleman	Depok
		Gamping
		Prambanan
3	Bantul	Banguntapan
		Kasih
		Sewon
4	Kulon Progo	Sentolo
		Nanggulan
5	Gunung Kidul	Wonosari
		Playen

Sumber : BNNP DIY

Dalam rapat yang dilaksanakan, selain pemetaan kawasan rawan yang ada di DIY dilaksanakan pula pemilihan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan alternatif sesuai dengan potensi usaha yang dimiliki DIY. Pemetaan potensi tersebut juga diambil melalui kuesioner. Setelah data kuesioner dihimpun maka terpilihlah enam jenis usaha yaitu Design, Tataboga, Percetakan, Otomotif, Peternakan atau pertanian, dan sablon.

Setelah selesai pemetaan kawasan rawan dan pemetaan jenis pelatihan usaha yang akan dilakukan selanjutnya adalah pemilihan lokasi pelatihan. Dalam diskusi yang dilaksanakan, terpilihlah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagai sasaran

pelatihan pemberdayaan alternatif 2019 dengan jenis pelatihan “*lifeskill*” kopi dan barista. Pemilihan Kecamatan Banguntapan sebagai wilayah kerja program pemberdayaan alternatif berdasarkan data yang di paparkan dalam rapat pemetaan wilayah rawan narkoba bahwa Kecamatan Banguntapan memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi sehingga Kecamatan Banguntapan berada pada zona merah. Selain itu, pemilihan Kecamatan Banguntapan sebagai sasaran juga merupakan rekomendasi dari BNN RI. Hal ini sehubungan dengan peluncuran Kecamatan Banguntapan menjadi desa bersinar sehingga dipilihlah Kecamatan banguntapan sebagai wilayah kerja program pemberdayaan alternatif pada tahun 2019. Sedangkan pemilihan pelatihan kopi dan barista karena banyaknya peluang usaha di dunia kopi yang akhir-akhir ini sedang mengalami peningkatan di DIY.

Peserta dalam kegiatan ini merupakan warga asli Kecamatan Banguntapan yang dinilai menjadi orang rawan penyalahgunaan narkoba. pemilihan peserta berdasarkan rekomendasi dari setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Banguntapan. Jumlah peserta ditargetkan ada 15 orang yang merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh aparat desa setempat. Peserta yang terlibat dalam program pemberdayaan alternatif ini merupakan orang rawan penyalahgunaan narkoba dan bekas pengguna yang telah melewati masa rehabilitasi dan masa tahanan.

Selanjutnya setelah ditentukan wilayah kerja program pemberdayaan alternatif. Maka disusunlah rencana kegiatan program pemberdayaan alternatif. Kegiatan program pemberdayaan alternatif berbentuk

pelatihan “*lifeskill*” dengan tema kopi dan barista. Pelatihan akan dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 19-20 Maret 2019. Pelatihan akan dilaksanakan mulai pukul 08.00-16.00 WIB setiap harinya. Kegiatan pelatihan berlokasi di Hotel Bintang Fajar, Jl. Perintis Kemerdekaan No.87, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pelatihan kali ini, materi utama yang akan disampaikan adalah mengenai kopi dan materi tentang kewirausahaan.

2. Involve

Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif, subbidang pemberdayaan masyarakat menggandeng orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Bantul. Diikutsertakannya para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Banguntapan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh subbidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan alternatif ini. Dalam proses sosialisasi ini, sosialisasi melalui kepala desa yang nantinya akan menunjuk perwakilan warga masyarakatnya dalam mengikuti pelatihan. Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari Kecamatan Banguntapan, perwakilan Desa Banguntapan, Kepala Dukuh Plumbon, Kepala Dukuh Pringgolayan, Kepala Dukuh Jomblangan, Kepala Dukuh Sorowajan, Kepala Dukuh Karangjambe, Kepala Dukuh Karangbendo, Kepala Dukuh Tegal Tandan, Kepala Dukuh Modalan, Babinsa Desa Banguntapan, Babinkamtibnas Desa Banguntapan, Tokoh Agama di Desa Banguntapan, Dinas Sosial Bantul, dan BNNK Bantul.

Selain para tokoh masyarakat yang berasal dari daerah bantul, kegiatan pelatihan “*lifeskill*” barista dan kopi memiliki juga mengajak lembaga pelatihan *Jogja Tourism Training Center (JTTC)* sebagai *trainer* dalam program pemberdayaan alternatif tersebut. Selain itu ada pula perwakilan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bantul yang akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan kepada peserta pelatihan.

3. *Socialize*

Proses sosialisasi program dilaksanakan dua kali yaitu tanggal 19 dan 28 Februari 2019 melalui program audiensi dengan aparat desa Kecamatan Banguntapan. Kegiatan audiensi ini dilaksanakan di Kantor Desa Banguntapan dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan program pelatihan “*lifeskill*” *barista dan kopi*. Dalam tahap sosialisasi ini, penentuan strategi komunikasi merupakan hal yang perlu dipahami supaya pesan komunikasi yang ingin disampaikan dapat diserap dengan baik oleh audiennya. Dalam kegiatan ini, tim dari subbidang pemberdayaan masyarakat menjelaskan kepada seluruh aparat desa yang hadir mengenai konsep pelaksanaan kegiatan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, serta tujuan pelaksanaan kegiatan mengapa pelatihan tentang kopi dan barista yang dipilih. Untuk pemilihan calon peserta diserahkan sepenuhnya kepada aparat desa yang dinilai lebih mengenal dan mengerti karakteristik calon peserta sehingga diharapkan prodrum pemberdayaan alternatif yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Gambar 4.2 Dokumentasi kegiatan sosialisasi



Sumber : BNNP DIY

4. *Cater*

Program pemberdayaan alternatif melalui pelatihan “*lifeskill*” barista dan kopi dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2019. Seperti yang telah disosialisasikan sebelumnya, pemilihan jenis pelatihan tersebut berdasarkan pengenalan serta penggalian potensi-potensi sumber daya yang ada di wilayah Kecamatan Banguntapan, Bantul. Kegiatan ini dijadwalkan dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB selama tiga hari berturut-turut yang dilaksanakan di Bintang Fajar. Dalam kegiatan ini, dipilihlah 15 orang perwakilan dari seluruh kelurahan yang ada dikecamatan Banguntapan, bantul. Berikut merupakan daftar nama peserta kegiatan pelatihan

Tabel 4.4 Daftar nama peserta kegiatan pelatihan

No	Nama	Daerah
1	Tutut Fajar Panuntun	Karangbendo
2	M. Saifulloh	Jomblangan
3	R. Ade Buwono J	Jomblangan
4	Tomi Suharyanto	Plumbon
5	M. Arif Nurcahyo	Plumbon
6	Satria Aji Bagus Pangestu	Plumbon
7	Rohadi Slamet	Pringgolayan
8	Ngadjiyo	Modalan
9	Krisyanto	Karang Jambe
10	Wisnu Riyanto	Karang Jambe
11	Riyanto Eko Purnomo	Karang Jambe
12	L. Anton Deswantoro	Sorowajan
13	Yuli	Jurugentong
14	Sardi	Jurugentong
15	Yohan	Pringgolayan

Sumber : BNNP DIY

Proses pelaksanaan program pemberdayaan alternatif dilaksanakan selama tiga hari. Dalam pelaksanaan program, subbidang pemberdayaan masyarakat menggandeng *trainer* dari tim JTTC yang akan menyampaikan materi mengenai kopi dan perwakilan dari PLUT yang nantinya akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan.

Pada hari pertama pelaksanaan kegiatan pelatihan "*lifeskill*" *barista dan kopi*, dimulai dengan sambutan dengan sambutan dari perwakilan BNNP DIY, BNNK Bantul, serta Kecamatan Banguntapan. Setelah itu dilanjutkan dengan materi

mengenai dasar-dasar kopi yang diberikan oleh pelatih dari tim JTTC. Dalam pelaksanaan pelatihan, peserta tidak hanya diberikan materi mengenai dunia kopi dan barista namun juga diperlihatkan secara langsung mengenai bagaimana proses *brewing* biji kopi mentah menjadi bubuk kopi siap pakai serta cara penyajian kopi yang baik dan benar.

Gambar 4.3 Dokumentasi hari pertama kegiatan



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.4 Dokumentasi perwakilan BNNP DIY, BNNK Bantul, dan Kecamatan Banguntapan saat memberikan sambutan



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.5 Penyampaian Materi “Kopi dan Barista”



Sumber : Dokumentasi pribadi

Pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada pelatihan mengenai mesin pembuat kopi otomatis dan pemberian informasi mengenai pengalaman pelatih dalam mengelola salah satu brand kopi terbesar di dunia, *Starbucks*. Peserta terlihat antusias dalam mengikuti pelatihan hari kedua dikarenakan pada hari kedua difokuskan pada praktek pembuatan kopi menggunakan mesin penggunaan kopi.

Gambar 4.6 Pemaparan *trainer* JTTC



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.7 Praktik menggunakan mesin kopi



Sumber : Dokumentasi pribadi

Pada hari ketiga atau hari terakhir, para peserta diberikan materi mengenai proses *manual brew*, dalam melaksanakan praktek peserta dijelaskan cara-cara menyajikan kopi melalui cara manual. Selain itu ada pula penyampaian materi mengenai cara mendirikan usaha yang diberikan oleh perwakilan dari PLUT Bantul. Terakhir ditutup dengan pemberian alat penyeduh kopi manual yang diharapkan menjadi modal awal untuk membangun usaha.

Gambar 4.8 Praktik *manual brew* yang dilakukan para peserta pelatihan



Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.9 Penyerahan alat *manual brew* dari BNNP DIY kepada peserta pelatihan



Sumber : Dokumentasi pribadi

5. *Utilize*

Dalam program pengembangan masyarakat ini, BNNP DIY melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kegiatannya. Masyarakat lokal yang dimaksud adalah penduduk asli di wilayah Banguntapan. Berikut merupakan daftar nama peserta program pemberdayaan alternatif

Tabel 4.4 Daftar nama peserta kegiatan pelatihan

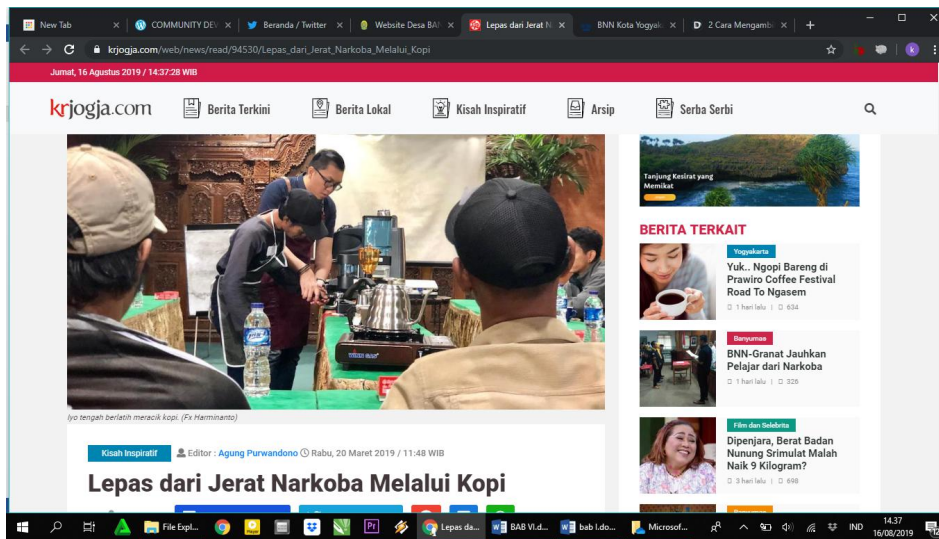
No.	Nama	Daerah
1	Tutut Fajar Panuntun	Karangbendo
2	M. Saifulloh	Jomblangan
3	R. Ade Buwono J	Jomblangan
4	Tomi Suharyanto	Plumbon
5	M. Arif Nurcahyo	Plumbon
6	Satria Aji Bagus Pangestu	Plumbon
7	Rohadi Slamet	Pringgolayan
8	Ngadjiyo	Modalan
9	Krisyanto	Karang Jambe
10	Wisnu Riyanto	Karang Jambe
11	Riyanto Eko Purnomo	Karang Jambe
12	L. Anton Deswantoro	Sorowajan
13	Yuli	Jurugentong
14	Sardi	Jurugentong
15	Yohan	Pringgolayan

Sumber : BNNP DIY

6. *Socialize*

Selain melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat luas yang tidak terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi yang dimaksud adalah pemberitaan mengenai proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat luas. Proses sosialisasi ke masyarakat luas ini dilakukan melalui media masa seperti surat kabar online dan media sosial milik BNNP DIY

Gambar 4.10 *Socialize* program pemberdayaan alternatif pada media online KR Jogja



Sumber : website <https://krjogja.com/>

Berikut merupakan kutipan berita dari KR Jogja

Lepas dari Jerat Narkoba Melalui Kopi

YOGYA, KRJOGJA.com - Iyo, pria berusia sekitar 40-40an itu terlihat grogi saat memegang mesin pembuat kopi. Ia mencoba serius mendengarkan petunjuk dari barista yang mengajarnya. Ini merupakan pengalaman pertamanya bersentuhan dengan mesin pembuat kopi.

Iyo adalah satu dari 15 mantan pecandu, mantan pengedar, serta masyarakat rentan penyalahgunaan narkoba yang mengikuti Bimbingan Life Skill Meracik Kopi yang diadakan oleh [Badan Narkotika Nasional Provinsi \(BNNP\) DIY](#). Acara yang berlangsung 19-21 Maret 2019 di Hotel Bifa Kotagede menghadirkan Barista Mario A Soewastiarjo untuk membagi ilmunya pada para peserta.

Meski baru pertama kali membuat kopi dengan mesin, Iyo berusaha keras untuk bisa. Wajahnya sedikit pucat, saat ia mencoba membuat cappuccino. Perlahan wajah itu berubah sumringah, *foam* yang dituangkan ke cangkir kopi terlihat nikmat dan tak kalah dari kopi-mahal di kafe yang kini sedang menjamur di Yogya.

“Iki kudu digoceki ben dadine apik. Tapi kok ora nganggo gula yo, wah pait iki biasane ngombe kopi sachet e,” ungkapnya diikuti gelak tawa para peserta lainnya.

Suasana yang semula tegang berubah menjadi cair karena pria tersebut yang mengawali praktek peserta di hari ini. Dua gelas kopi dibuat masing-masing peserta untuk nantinya dirasakan dan dipelajari untuk bekal kemudian hari.

Rilis data ungkap kasus Narkoba Polda DIY menyebut data kasus Narkoba di wilayah Polresta Yogyakarta sebanyak 150 kasus, Polres Sleman (101 kasus), Polres Bantul (80 kasus), Polres Kulon Progo (53 kasus), dan Polres Gunung Kidul (46 kasus). Fakta tersebut cukup memprihatinkan dan memerlukan langkah strategis dalam memutus mata rantai itu.

Hal tersebut coba diurai Badan Narkotik Nasional Provinsi (BNNP) DIY melalui kegiatan pelatihan meracik kopi. Khusus untuk kali ini 15 peserta berasal dari wilayah Kecamatan Banguntapan Bantul yang dari hasil pemetaan merupakan daerah rawan narkoba.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY, Bambang Wiryanto S Si mengungkapkan kegiatan bimbingan life skill tersebut dilaksanakan untuk memutus ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemberian keterampilan meracik kopi sengaja dipilih lantaran saat ini semakin banyak orang membutuhkan kopi dengan penyajian yang serius serta menarik.

“Teman-teman ini nanti kami harapkan bisa memulai usaha setelah mengikuti pelatihan agar mereka bisa menjauh dari narkoba. Kalaupun nanti buka angkringan ya kopinya bisa enak jadi langganannya banyak, kalau tidak ya ikut kerja jadi barista karena sudah punya skill. Masa depan masih bisa diupayakan, jangan menengok ke belakang,” ungkapnya pada KRjogja.com.

Di hari terakhir, Kamis (21/3/2019) esok hari, para peserta akan dilatih cara memulai bisnis oleh ahli dari Jogja Tourism Training Center (JTTC) dan Dinas Koperasi UKM DIY. *“Kali ini kami berharap mereka lepas dari narkoba lewat kopi,”* pungkas Bambang Wiryanto. (Fhx)

Gambar 4.11 *Socialize* program pemberdayaan alternatif pada *website* Kecamatan Bantul



Sumber : *website* <https://banguntapan.bantulkab.go.id/>

Berikut merupakan kutipan artikel *website*

Pelatihan Barista BNNP DIY Resmi ditutup

Hari ini (kamis-red) 21/3/2019 pelatihan meracik dan menyajikan kopi resmi ditutup oleh Kepala bagian umum BNNP DIY Drs. Setiya Pranata, M.Eng. Dalam kata sambutan beliau mengatakan bahwa sudah saatnya peserta pelatihan nantinya mengambil peran di masyarakat. "Berlomba lombalah dalam kebaikan," pesannya.

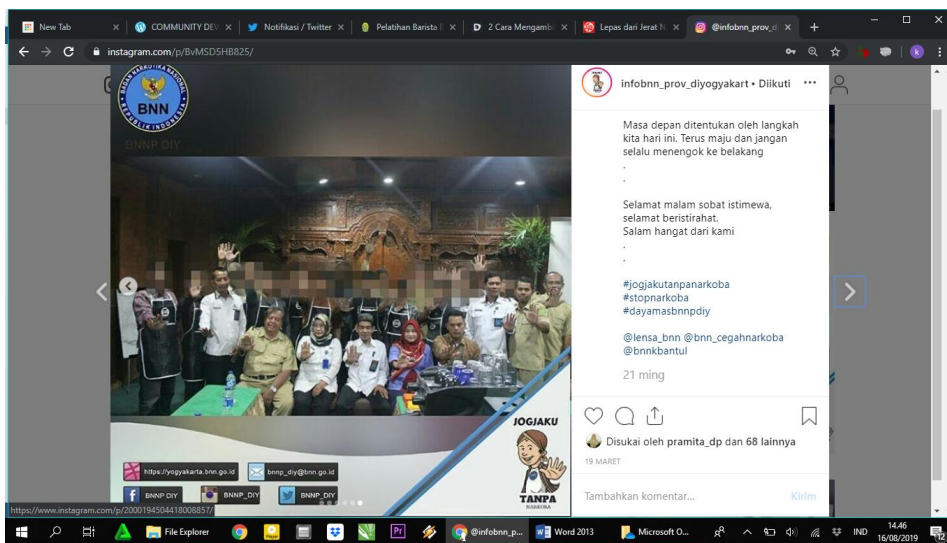
"Semoga peserta pelatihan bisa menjadi pengusaha yang sukses", sambung beliau.

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dimulai tanggal 19/3/2019 dan ditutup 21/3/2019, di Hotel BIFA jalan perintis kemerdekaan Yogyakarta. Usai pelatihan semua peserta mendapatkan Bantuan Alat dan Bahan untuk meracik kopi, secara simbolis diberikan kepada perwakilan peserta. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mewujudkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba), Sesuai Dengan Program dari BNN Pusat, yang berkedudukan di Jakarta.

Penutupan dihadiri pula oleh Kasie Pelayanan PemDes Banguntapan Bapak Darmaji, dan Kepala BNNK Bantul Arfin Munajah, S.E, MM.

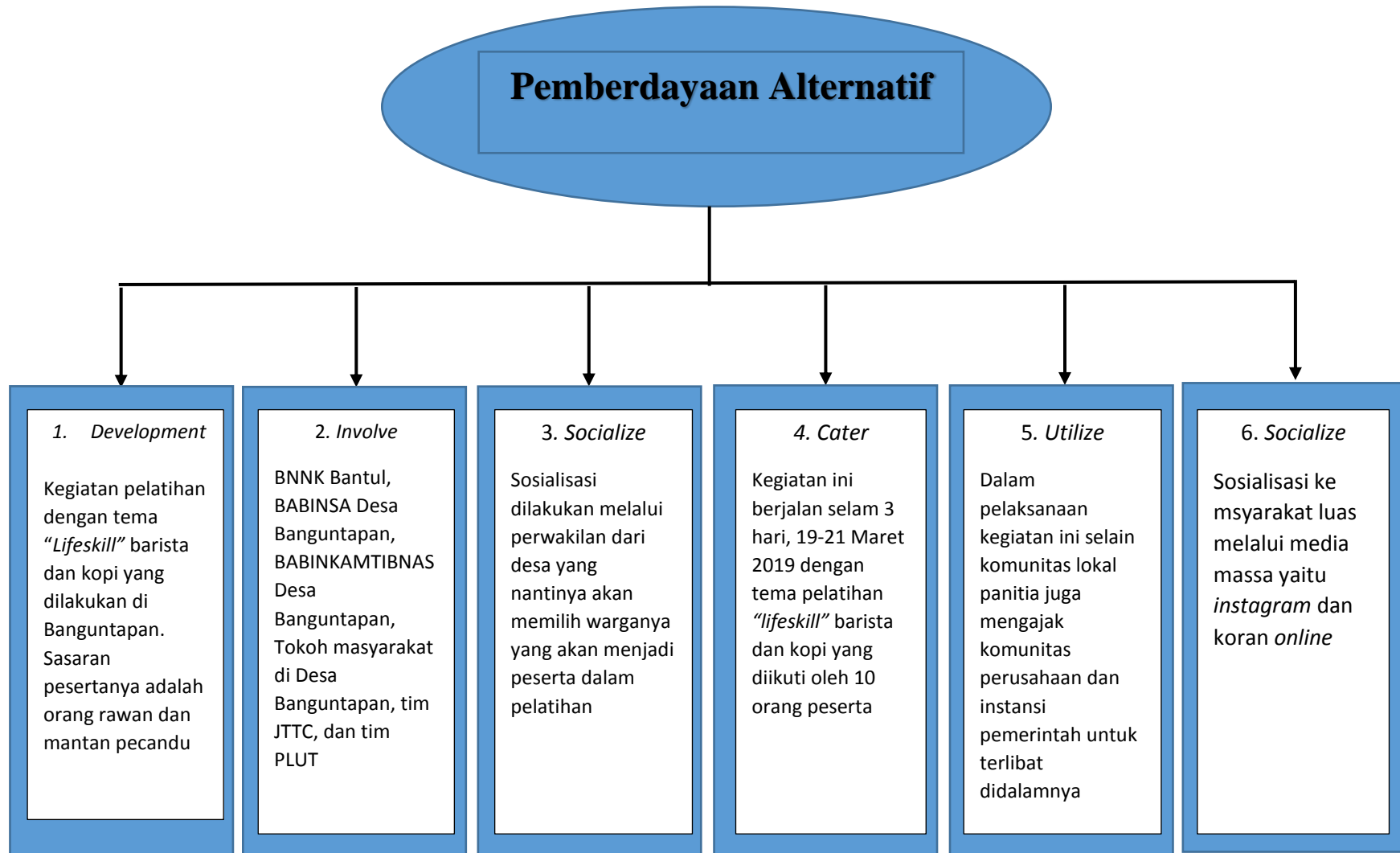
(herjun/adm)

Gambar 4.12 *Socialize* program pemberdayaan alternatif pada media sosial milik BNNP DIY (@Infobnn_prov_diyogyakarta)



Sumber : instagram @Infobnn_prov_yogyakarta

Gambar 4.11 Bagan prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif



b) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Program pemberdayaan peran serta masyarakat merupakan implementasi dari *community development*. Program pemberdayaan peran serta masyarakat merupakan program pelatihan melalui *workshop* yang *outputnya* merupakan pembentukan penggiat anti narkoba diberbagai lapisan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mengajak masyarakat menyadari bahwa ‘perang’ melawan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh semua orang dan bukan hanya tanggung jawab BNNP DIY saja. Program ini memiliki 4 sasaran peserta yaitu dilingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan instansi swasta, dan lingkungan pemerintah. Wilayah kerja program pemberdayaan peran serta masyarakat mengikuti wilayah kerja BNNP DIY secara keseluruhan.

Dimulai pada tahun 2016, program merupakan program tahunan yang dilakukan secara berkala di wilayah kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2016, wilayah kerja program pemberdayaan peran serta masyarakat berada Kota Yogyakarta. Dilanjutkan dengan tahun 2017, program ini memiliki wilayah kerja di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2018, wilayah kerja program pemberdayaan peran serta masyarakat berada di Kabupaten Bantul. Dan pada tahun 2019, wilayah kerja program ini ada di Kabupaten Kulon Progo

Selanjutnya berikut merupakan penjabaran proses Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

1. *Development*

Dalam program pemberdayaan peran serta masyarakat, ada dua pokok program yang dilaksanakan yaitu program pelatihan dan pemberian ilmu dasar mengenai narkoba melalui *workshop* yang *output-nya* merupakan pembentukan para penggiat anti narkoba

dilingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, serta lingkungan pemerintah dan program pelaksanaan tes urin bagi instansi-instansi yang membutuhkan tenaga bantuan dalam pelaksanaan tes urin.

Konsep kegiatan ini adalah pelatihan dalam bentuk *workhop* dimana nantinya para peserta yang mengikuti kegiatan akan dilatih menjadi penggiat anti narkoba dengan tema “Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba”. program ini dilaksanakan dalam upaya mengajak peran serta aktif masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkoba lingkungannya. Wilayah kerja program pemberdayaan peran serta masyarakat mengikuti wilayah kerja BNNP DIY. Sasaran program pemberdayaan peran serta masyarakat dibagi menjadi 4, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan dunia swasta, dan lingkungan instansi pemerintah.

Kegiatan ini dimulai pada tahun 2016, wilayah kerja program pemberdayaan peran serta masyarakat berada diwilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2017, wilayah kerja program pemberdayaan masyarakat ada diKabupaten Sleman. Pada tahun 2018 wilayah kerja program ini berada di Kabupaten Bantul. Selanjutnya program pemberdayaan peran serta masyarakat berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Seperti yang yang disebutkan diatas, sasaran program pemberdayaan alternatif terbagi ke dalam 4 kelompok yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan instansi swasta, dan lingkungan instansi pemerintah. Pengelompokan tersebut dilakukan agar lebih memudahkan pesan anti narkoba melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi dilapangan. Berikut merupakan contoh proposal program pemberdayaan masyarakat dilingkungan instansi pemerintah

2. *Involve*

Dalam program pemberdayaan peran serta masyarakat, banyak pihak yang terlibat dalam proses berlangsungnya program. Pada lingkungan pendidikan, target sasaran program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat ini merupakan siswa-siswi serta mahasiswa-mahasiswi dari berbagai instansi pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), serta Perguruan Tinggi (PT) yang berada diwilayah Kabupaten Kulon Progo. Dimulai dengan melakukan pendataan seluruh SMA, SMK, MA, dan PTN setelah itu ditindak lanjuti dengan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait akan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat serta untuk mengirimkan perwakilannya dalam kegiatan tersebut.

Untuk lingkungan masyarakat, dipilihlah 30 orang peserta yang terdiri dari perwakilan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dipilihnya ibu-ibu PKK sebagai target peserta dalam pelaksanaan program pemberdayaan peran serta masyarakat selain karena dinilai memiliki akses yang luas di dalam menggiatkan program anti narkoba di lingkungannya juga karena permintaan khusus dari wakil ketua PKK Kabupaten Kulon Progo, Ibu Hj. Sri Wahyu Widhanti.

Selanjutnya untuk lingkungan swasta, yang menjadi target peserta adalah perwakilan dari seluruh badan usaha swasta yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dengan penetapan target tersebut, diharapkan bahwa badan-badan usaha swasta yang berada dilingkungan Kabupaten Kulon Progo juga memiliki kepedulian mengenai isu penyalahgunaan narkoba yang ada dilingkungannya.

Dan untuk dilingkungan pemerintah, dipilihlah 2 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan dari setiap instansi pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berjumlah total 30 orang.

3. *Socialize*

Sebelum kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba dilaksanakan, dilakukan terlebih dulu proses sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai konsep, bentuk acara, tujuan, serta sasaran peserta. Ada tiga materi utama yang disampaikan dalam acara sosialisasi ini yaitu materi tentang Inpres No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), peran serta masyarakat dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan implementasi rencana peran serta masyarakat. Dalam sosialisasi ini, pesertanya merupakan perwakilan dari tiap kelompok lingkungan masyarakat yang nantinya akan menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba.

Gambar 4.13 Rapat koordinasi program pemberdayaan peran serta masyarakat



Sumber : Dokumentasi pribadi

4. *Cater*

Pada proses pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi 4, yaitu : pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba dilingkungan masyarakat, pengembangan kapasitas dilingkungan pendidikan, pengembangan kapasitas dilingkungan swasta, serta pengembangan kapasitas dilingkungan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada 6 materi pokok yang wajib disampaikan, yaitu : pengetahuan dasar terkait narkoba, informasi terkait rehabilitasi, materi tentang *public speaking*, materi mengenai *action plan*, motivasi, dan dinamika kelompok. Materi mengenai *action plan* adalah materi dimana setiap peserta yang hadir diwajibkan membuat 1 program yang berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Program yang dituangkan dalam *action plan* tersebut yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi kegiatan pada akhir semester. Berikut merupakan contoh *action plan*

Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba dilingkungan pemerintah telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019. Bentuk kegiatan ini adalah *workshop* yang diikuti oleh 40 orang berwakil dari 20 instansi pemerintah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam kegiatan ini ada 4 pembicara yang terlibat, yaitu : dr. Akhmad Akhadi. S, MPH selaku direktur di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta yang menyampaikan materi mengenai rehabilitasi, Aris Subagya, S. Sos. selaku kepala sie Pemberdayaan Masyarakat yang menyampaikan materi tentang *action plan*, Erik Hadi Saputra yang menyampaikan materi mengenai motivasi dan *public speaking*, serta Drs. *Setia Pranata* M.Eng selaku perwakilan dari BNNP DIY yang menyampaikan materi terkait narkotika.

Gambar 4.15 Dokumentasi kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba dilingkungan masyarakat



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 4.16 Simbolis penyematan pin penggiat anti narkoba



Sumber : Dokumentasi pribadi

Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba dilakukan dilingkungan masyarakat. Yang menjadi audien dalam kegiatan ini merupakan 30 orang perwakilan dari ibu-ibu Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dalam melaksanakan kegiatan ini ada 4 pembicara yang ikut terlibat, yaitu : Drs. *Setia Pranata* M.Eng selaku perwakilan dari BNNP DIY, Erik Hadi Saputra yang menyampaikan materi mengenai motivasi dan *public speaking*, Eko Prasetyo yang menyampaikan materi tentang rehabilitasi, dan Sintia, S. Pd, M. Si. M. A. yang menyampaikan materi mengenai parenting. Materi parenting merupakan materi tambahan yang diberikan oleh BNNP DIY. Materi tambahan ini diberikan berdasarkan analisis audien yang hadir.

Gambar 4.17 Dokumentasi kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan penggiat anti narkoba



Sumber : dokumentasi pribadi

Gambar 4.18 Penyerahan pin penggiat anti narkoba



Sumber : Dokumentasi pribadi

Sedangkan dua kegiatan lagi yaitu kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba pada lingkungan pendidikan dan swasta belum terlaksana dan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September tahun 2019.

Tugas utama yang harus dilaksanakan oleh para penggiat anti narkoba adalah merancang dan melaksanakan program yang berhubungan dengan aksi P4GN dilingkungannya masing-masing. Para penggiat anti narkoba diminta untuk membuat rencana aksi yang sederhana dan memungkinkan untuk dilaksanakan di wilayahnya. Perealisasian rencana aksi tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan program. Evaluasi akan dilaksanakan di akhir periode dimana satu periodenya memiliki durasi waktu satu tahun. Realisasi rencana aksi Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba(P4GN) yang telah dilakukan yaitu melaksanakan tes urin di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di bawah Kementerian Pertanian.

Pada akhir pelaksanaan *workshop*, dilaksanakan prosesi pelantikan para penggiat anti narkoba. Para penggiat anti narkoba tersebut akan diberikan pin dengan nomor seri. Pemberian pin kepada peserta sebagai simbol kewajiban para penggiat anti narkoba untuk aktif berperan upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing.

5. *Utilize*

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba ini, sie Dayamas melibatkan komunitas lokal yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu : lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, dan lingkungan pemerintah terlibat didalamnya. Berdasarkan program yang telah terlaksana, ada dua komunitas lokal yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Berikut merupakan daftar nama peserta kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba.

Tabel 4.6 Daftar nama peserta pengembangan kapasitas dan pembnaan masyarakat anti narkoba di lingkungan masyarakat

No.	NO PIN	NAMA LENGKAP
1	31	Eka Suciyati
2	32	Susi Astuti
3	33	Retno Giriarti
4	34	Mariastuti
5	35	Ika Hestu Mekarti
6	36	Sri Harimurtiati
7	37	Marjiyati
8	38	Dany Sunarjanti
9	39	Budi Rahayu
10	40	Sumarni
11	41	Ruqyah
11	42	Umi Asih
13	43	Tri Wuryani
14	44	Sutini
15	45	Juminten
16	46	Sukindari
17	47	Ari M
18	48	Sulasmi
19	49	Harjuningsih
20	50	Lilis Suryaningsih
21	51	Juminah
22	52	Khoiri Fitriana
23	53	Sulistiyani
24	54	Prima Uniyanti
25	55	Sukarsih
26	56	Endah Suwarni
27	57	Juminah
28	58	Maryati
29	59	Nur Istiqlaliyah
30	60	Sofwati

Sumber : BNNP DIY

Tabel 4.7 Daftar nama peserta pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba dilingkungan pemerintah

No.	NAMA INSTANSI	NAMA PESERTA
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo	SYAFRIDAH YASIN, SPd EKO BUDI ANTORO, SPd
2.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo (DPU-PKP)	BUDI PURWANTA, SPd.T MA'MUROH SRI SETIA HATI, S.AP
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo	YULIANTANA NUGRAHA, SIP, Msi ANJARWOKO
4.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo	WAHYU BUDIARTO, S.I.P
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo	Drs. WAHYU PUJIANTO SITI NURHAYATI, S.I.P
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	WIDODO SULINA
7.	Dinas Perhubungan Kulon Progo	EVI YULIANTI, S.I.P AGUS SUPRIYANTA, S.I.P
8.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kulon Progo	HERI DARMAWAN, AP.M.M MUHAMMAD HARIYANTO
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kulon Progo	Drs. JUNIHARDI SARJONO RETNO DWI HANDAYANI, S.Si,MT
10.	Dinas Kebudayaan Kulon Progo	GUNAWAN EDY NUGROHO, S.Sn
2.	Kepala Polres Kulon Progo	AIPDA MADE RATMERA BANIT AIPU ERWAN SUKENDAR, S.H., PS
3.	Komandan Distrik Militer 0731/Kulon Progo	SERTU YULIANTORO MUJI RAHARJO, S.Pd
4.	Kepala Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kulon Progo	AGUS SUDARMADI AMBAR
5.	Kepala RSUD Nyi Ageng Serang Kulon Progo	RINI DAMAYANTI, S.Kep.Ns SUGENG RIJADI, A.Md

6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kulon Progo	MARUTO,S.I.P FARIDA RATNA KUSUMAWATI,S.I.P
----	--	--

Sumber :BNNP DIY

6. Socialize

Setelah proses *cater* selesai dilaksanakan, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat secara luas tentang program pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba melalui media massa. Media massa yang digunakan dapat berupa media sosial maupun media cetak. Gambar 4.17 *Socialize* program melalui media massa *website* milik

Kominfo Kulon Progo



Berikut merupakan kutipan berita dari *website* kominfo kulon progo

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY menggelar workshop pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat anti narkoba di tingkat Intansi Pemerintahan. Di Yogyakarta, Selasa (26/3/2019). Dihadiri sekitar 15 Intansi pemerintah di Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir Kepala Bidang Umum BNNP DIY Drs. Setia Pranata M.Eng., Ka. Sie Dayamas BNNP DIY Aris Subagya, S. Sos., Selain itu juga hadir narasumber dokter Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grasia DIY dr. Akhmad Akhadi S, M.PH., Inspirator dan Motivator Erick Hadi Saputra S.Kom., M.Eng., dan Comunication department UGM dr. Muhamad Sulhan.

Kepala Bidang Umum BNNP DIY Setia Pranata mengatakan dalam rangka pengembangan kapasitas sekaligus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi agar diterima seluruh OPD yang ada di Kulon Progo. Karena berkaitan dengan darurat narkoba sehingga keluarlah Intruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 6 tahun 2018. Setelah dilakukan sosialisasi ini, diharapkan aksi Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) segera dilakukan di masing-masing Intansi.

"Seperti deteksi dini atau tes urine di masing-masing Intansi serta pembentukan Satgas anti narkoba. Selain itu kita bersama – sama secara menyeluruh, berkesinambungan mulai dari bawah sampai kelembagaan di pusat. Tentunya bekerja bersama – sama untuk menuntaskan darurat narkoba. Sehingga kita yakin semua OPD yang ada di Kulon Progo tentunya dapat menyemarakkan, kita bisa melawan untuk narkoba," jelasnya.

Setia Pranata menambahkan adanya NYIA nantinya, Pemda segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Karena di DIY baru ada di Kota, Sleman dan Bantul. Kami dari BNNP sudah menego Pemda Kulon Progo untuk bisa membentuk BNNK walaupun baru tahap moratorium tentang BNNK kota atau Kabupaten.

Mengingat keberadaan NYIA di Kulon Progo sangat penting dan menjadi celah masuk peredaran narkoba. Nantinya BNNK Kulon Progo yang kita ajukan ke pusat mendapat lampu hijau, sehingga BNNK Kulon Progo dapat di bangun, walau prosesnya panjang. Tentunya NYIA yang sudah disiapkan, BNNK pun juga harus di persiapkan.

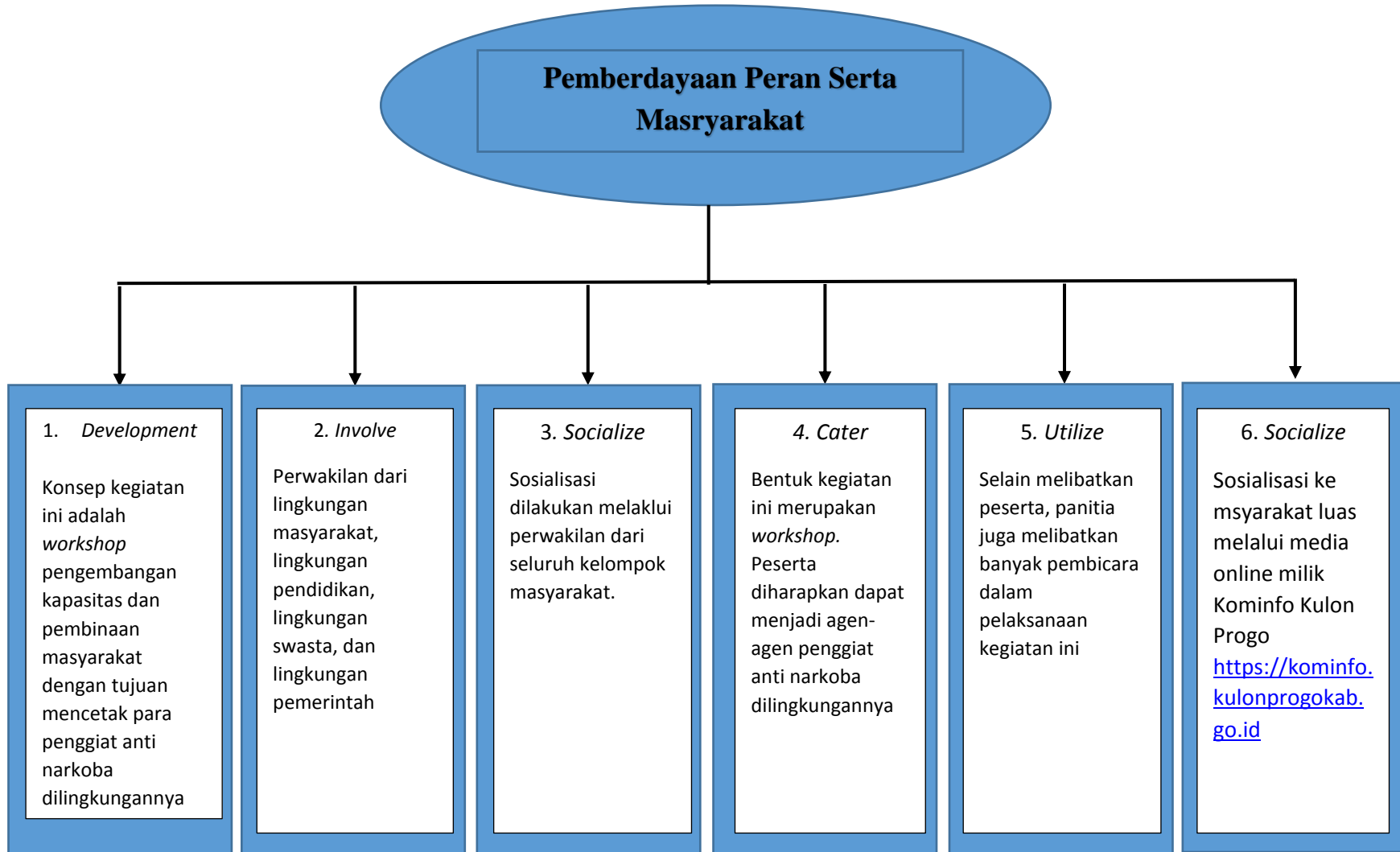
Sementara itu salah satu narasumber dokter RSJ Grasia DIY dr. Akhmad Akhadi menjelaskan pecandu perlu adanya rehabilitasi, kecanduan adalah sakit, rehabilitasi mampu mengendalikan peredaran narkotika serta merupakan perintah peraturan perundangan No. 35 Tahun 2009 pasal 54 tentang narkotika.

"Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,"

Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dan semua golongan untuk ikut terlibat aktif dalam mengawasi peredaran narkotika di masing – masing daerahnya. Pengembangan harus di tingkatkan sehingga semuanya menerima dan bersinergi untuk bekerja bersama – sama melawan narkoba.

Sumber : *website* <https://kominfo.kulonprogokab.go.id>

Gambar 4.18 Bagan prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaan program pemberdayaan peran serta masyarakat



C. Analisis Penulis

Dalam pelaksanaan *community development* melalui program pemberdayaan peran serta masyarakat dan program pemberdayaan alternatif yang dilaksanakan oleh Subbidang Pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, namun ada beberapa kendala sehingga perencanaan program yang matang dan profesional sangatlah penting. *Community development* merupakan salah satu pendekatan dari induk konsep *corporate social responsibility* yang merupakan salah satu tugas dari seorang praktisi public relations. BNNP DIY melalui subbidang pemberdayaan masyarakat mengimplementasikan kegiatan *community development* kedalam dua program, yaitu : Program pemberdayaan peran serta masyarakat dan program pemberdayaan alternatif. Dari kedua program *community development* tersebut, penulis dapat analisis sebagai berikut:

Pada penerapan prinsip *development*, untuk sasaran target program tidak hanya mengikuti wilayah kerja yang ditentukan oleh BNNP DIY secara luas namun juga melakukan analisis kebutuhan publik. Seperti pada program pemberdayaan alternatif, pemilihan wilayah kerja berdasarkan dengan kebutuhan publiknya di wilayah Kecamatan Banguntapan yang masuk dalam zona merah angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pada pemberdayaan peran serta masyarakat, wilayah kerjanya sesuai dengan wilayah kerja BNNP DIY

Pada penerapan prinsip *involve*, di kedua program mengajak peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Selain mengajak peran serta masyarakat dalam berpartisipasi menjadi peserta, Subbidang Pemberdayaan Alternatif juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehingga menjadi contoh untuk masyarakat disekitarnya.

Proses *socialize*, pada proses sosialisasi ini subbidang pemberdayaan masyarakat mengundang perwakilan dari masyarakat untuk diberi informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam proses *Cater*, subbidang pemberdayaan masyarakat mengajak peran serta aktif masyarakat saat proses pelaksanaan program. Dengan menggandeng pihak-pihak yang dianggap

berkompeten dalam bidangnya, dengan demikian diharapkan masyarakat mau berperan serta aktif dalam proses pelaksanaan program. Kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif adalah peserta yang terlibat tidak semua memiliki *concern* yang sesuai dengan tujuan kegiatan, sehingga tidak semua peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Selain itu proses tidak lanjut dari kegiatan tindak lanjut dari program yang sudah terlaksana kurang intensif sehingga sebagian dari peserta berhenti ditengah jalan saat melaksanakan kegiatan belum sampai tahap evaluasi.

Proses *utilize*, pada tahap ini, subbidang pemberdayaan masyarakat melibatkan tidak hanya komunitas lokal, tapi juga melibatkan komunitas perusahaan, dan instansi pemerintahan. Proses *socialize*, pada tahap ini sosialisasi yang dilakukan bukan hanya kepada peserta namun juga kepada masyarakat luas. Sosialisasi yang dilakukan berupa pemberitaan atau *perss release* di media massa seperti media sosial dan media *online*.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif adalah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini tidak semua memiliki kepedulian yang sama dengan tujuan dilaksanakannya program sehingga kualitas partisipasi masyarakat kurang maksimal walaupun dari segi kuantitas partisipasi pesertanya maksimal. Selain itu, proses pembinaan atau tindak lanjut dirasa kurang efektif sehingga banyak peserta yang berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan tujuan kegiatan hingga akhir. Selain itu, pendampingan pasca program yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang kurang sehingga sebagian peserta dari program yang diberikan berhenti ditengah jalan. Contohnya dalam pelaksanaan pelatihan pemberdayaan alternatif, ditemukan beberapa peserta yang menjual modal berupa alat yang diberikan saat pelatihan. Sehingga kesuksesan pelaksanaan program *community development* yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dapat diukur secara kuantitas peserta program dan bukan kualitas yang dihasilkan setelah pelaksanaan program selesai.

Selain itu proses publikasi yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan kurang maksimal, hal ini berkaitan dengan pemberitaan kegiatan di media baik media massa milik BNNP DIY maupun media massa komersil sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sebagai humas di BNNP DIY, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan *community development* dalam kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif merupakan serangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang dapat dijabarkan melalui prinsip-prinsip *community development*, yaitu : *development, involve, socialize, cater, utilize, dan socialize*. Baik pada program pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif keduanya diawali dengan penentuan sasaran dan wilayah kerja serta konsep dari kegiatan. Untuk penentuan wilayah kerja, pemberdayaan peran serta masyarakat memiliki wilayah kerja yang sama dengan wilayah kerja BNNP DIY secara keseluruhan yaitu Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo dipilih menjadi wilayah kerja sehubungan dengan pembangunan NYIA yang dinilai bisa menjadi potensi menjadi pasar penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk wilayah kerja program pemberdayaan alternatif, wilayah kerja menyoar wilayah yang membutuhkan program tersebut. Penentuan wilayah kerja program pemberdayaan alternatif berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan pada setiap tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan, kedua program sama-sama melibatkan komunitas lokal dan komunitas perusahaan. Selain itu, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga dianggap penting sehubungan dengan partisipasi masyarakat karena tokoh masyarakat dianggap sebagai ‘penggerak’. Untuk pemberdayaan peran serta masyarakat, audiennya dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, dan lingkungan instansi pemerintah. Selain keenam prinsip *community development* diatas, ada juga satu prinsip mengenai kesetaraan *gender*. Diharapkan masyarakat secara luas tanpa mengenal jenis kelamin

dapat ikut serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini disimboliskan melalui pemilihan peserta program yang tidak dibatasi berdasarkan *gender* untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP DIY.

Tujuan dilaksanakan kegiatan *community development* melalui program pemberdayaan peran serta masyarakat dan program pemberdayaan adalah menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud tidak melulu soal materi, melainkan juga peningkatan dari segi sosial dan budaya. Sehingga melalui kedua program tersebut diharapkan masyarakat menyadari peran sertanya dalam upaya pemberantasan narkoba.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta demi peningkatan kuantitas dan eksistensi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mata publiknya, yaitu :

1. Membentuk subbidang khusus hubungan masyarakat sehingga segala bentuk kegiatan dan tugas humas dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga para anggota tim kehumasan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dibidangnya masing-masing.
2. Memaksimalkan media massa yang dimiliki baik media sosial maupun *website* dalam upaya memberikan informasi publik mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan secara luas mengenai Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat.
3. Kegiatan yang bertujuan untuk *mem-branding* Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih sering dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan dan menjaga eksistensi Badan Narkotika Nasional di mata masyarakat luas.
4. Dalam pemilihan sasaran kegiatan, diharapkan lebih spesifik lagi dan tidak terkesan memaksakan agar tujuan dari program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
5. Dalam alokasi anggaran pelaksanaan program, dapat lebih ditinjau lagi sehingga dapat menunjang proses pelaksanaan program baik pemberdayaan peran serta masyarakat maupun pemberdayaan alternatif dengan porsi yang sama dan sesuai dengan kebutuhan pesertanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Cultip, Center, dan Broom. 2005. *Effective Public relations*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia
- Ife, Jim. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi : Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jefkins, Frank. 1992. *Public Relations*. Jakarta: Erlangga
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber Lain :

- Center. 2019. *BNNP DIY Bersama Instansi Pemerintah Perangi Narkoba*. Yogyakarta.
https://kominfo.kulonprogokab.go.id/web/view_berita/881/BNNP-DIY-BERSAMA-INTANSI-PERANGI-NARKOBA. Diakses pada 16 Agustus 2019.
- Herjun. 2019. *Pelatihan Barista BNNP DIY Resmi Ditutup*. Yogyakarta
<https://banguntapan.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/47-Pelatihan-Barista-BNNP-DIY-Resmi-ditutup>. Diakses pada 12 Agustus 2019.
- Purwandono, Agung. 2019. *Lepas dari Jerat Narkoba Melalui Kopi*. Yogyakarta.
https://krjogja.com/web/news/read/94530/Lepas_dari_Jerat_Narkoba_Melalui_Kopi. Diakses pada 12 Agustus 2019.
- Triyono, Agus. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program PosDaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Tbk Pabrik Cilacap*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wicaksono, Ridho. 2015. *Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Perkara Narkotika*. Surabaya: Universitas Airlangga.